



**STRONGMEN
DAN
KELOMPOK KEKERASAN
DI JAWA**

Perkembangan dan Realisasinya dengan Kekerasan Massa
dalam Bingkai Budaya dan Politik di Indonesia

Yanwar Pribadi, Ph.D.

**FTK Banten Press
&
LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten**

STRONGMEN
DAN KELOMPOK KEKERASAN
DI JAWA

Perkembangan dan Relasinya dengan Kekerasan Massa dalam
Bingkai Budaya dan Politik Lokal di Indonesia

Dr. Yanwar Pribadi, M.A.

FTK Banten Press

&

LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Dr. Yanwar Pribadi, M.A.

Strongmen dan Kelompok Ekerasan Di Jawa Perkembangan dan Relasinya dengan Kekerasan Massa dalam Bingkai Budaya dan Politik Lokal di Indonesia/ Dr. Yanwar Pribadi, M.A. - Serang: Penerbit FTK Banten Press dan LP2M IAIN SMH Banten, 2014, x, 116 hlm.; 21,2 cm x 25 cm.

ISBN 978-602-340-008-9

© hak pengarang dilindungi Undang-Undang
Cetakan Pertama, Desember 2014

Pengarang: Dr. Yanwar Pribadi, M.A.

Dicetak oleh: CV Aji Putra

Penerbit: FTK Banten Press bekerja sama dengan LP2M IAIN
Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Ciceri Serang Banten 42118

FTK Banten Press

&

LP2M IAIN Sultan

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua LP2M	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang Masalah	1
Tujuan	2
Signifikansi Penelitian	3
Kerangka Konseptual	5
Telaah Pustaka	8
Metode Penelitian	10
BAB II FENOMENA KEKERASAN MASSA DI INDONESIA	13
Pendahuluan	13
Kekerasan Massa dalam Literatur	14
State of Violence	15
Kekerasan Massa pada Masa Pra-Kolonial	17
Masa Kekerasan Orang-orang Eropa	19
Masa Revolusi Kemerdekaan	21
Masa Orde Baru	26
Penutup	30
BAB III RAMPOK-BANDIT PADA MASA KOLONIAL JAWA	33
Pendahuluan	33
Studi tentang Perbanditan	33
Kondisi Umum Perbanditan di Jawa	37
Perbanditan dan Protes Sosial	39
Perbanditan dan Usaha-usaha Pemberantasannya	41
Penutup	47

BAB IV JAGO: MASTER DUNIA BAWAH__49

Pendahuluan__49

Kelompok-kelompok yang Mirip Jago__51

Jago dan Kriminalitas__53

Peran Lain Jago_56

Penutup__60

**BAB V JAWARA: JUARA YANG DITAKUTI DAN
DIKAGUMI__63**

Pendahuluan__63

Kemunculan Jawara__64

Relasi Jawara dan Masyarakat__65

Jawara dan Beragam Pemberontakan__68

Jawara dan Orde Baru__70

Jawara-jawara Besar Banten__76

Penutup : Jawara dan Konfigurasi Politik Lokal__82

BAB VI PREMAN: VRIJMAN MASA KINI?__85

Pendahuluan__85

Preman dan Kelompok Strongmen Lainnya__86

Preman dan Orde Baru__88

Penutup__90

**BAB VII SEPAK TERJANG STRONGMEN DALAM
BINGKAI BUDAYA DAN POLITIK LOKAL__93**

Pendahuluan__93

Fenomena Strongmen di Indonesia__94

Penutup__98

Bab VIII Penutup__99

Daftar Pustaka__105

STRONGMEN DAN KELOMPOK KEKERASAN DI JAWA

Ada beberapa alasan mengapa kelompok-kelompok strongmen dan kelompok-kelompok kekerasan di Indonesia, terutama di Jawa pada tingkat lokal menjadi topik utama penelitian ini. Pertama, Jawa adalah wilayah terpenting di Indonesia, baik pada masa kolonial maupun pada era kemerdekaan di mana kelompok-kelompok sosial tertentu di wilayah tersebut, termasuk kelompok-kelompok strongmen dan kelompok-kelompok kekerasan, sering berperan dalam menentukan sejarah Indonesia. Kedua, sejumlah tokoh-tokoh utama kelompok-kelompok strongmen dan kelompok-kelompok kekerasan di Indonesia, terutama di Jawa pada tingkat lokal seperti Tubagus Chasan Sochib, menduduki posisi penting di dunia politik dan domain budaya lokal. Ketiga, ada kekosongan cukup besar di dunia akademik yang berhubungan dengan tulisan-tulisan mengenai fenomena kekerasan massa dan sepak terjang kelompok-kelompok strongmen dan kelompok-kelompok kekerasan di Indonesia. Oleh karena itu, untuk merespon permasalahan di atas, penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan aspek-aspek spesifik di atas dan berkontribusi terhadap perdebatan ilmiah mengenai sejarah dan fenomena kelompok-kelompok sosial tertentu di Indonesia.

FTK Banten Press

&

LPCM IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

ISBN 602340008-6



9 786023 400089

Abstrak

Penelitian ini difokuskan pada fenomena kekerasan massa di Jawa, sejarah dan perkembangan *strongmen* dan kelompok kekerasan, dan sepak terjang mereka dalam bingkai budaya dan politik lokal di Indonesia. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah: Bagaimanakah latar belakang dan perkembangan kekerasan massa di Indonesia? Bagaimanakah latar belakang kemunculan kelompok-kelompok *strongmen* dan kelompok-kelompok kekerasan di Indonesia? Bagaimanakah perkembangan kelompok-kelompok ini? Bagaimanakah sepak terjang mereka dalam bingkai budaya dan politik lokal? Secara spesifik, pertanyaan-pertanyaan tentang kelompok-kelompok *strongmen* dan kelompok-kelompok kekerasan di Indonesia dapat diurai menjadi pertanyaan-pertanyaan seperti: Apakah sumber-sumber otoritas tokoh-tokoh penting kelompok-kelompok *strongmen* dan kelompok-kelompok kekerasan ini? Apakah strategi kepemimpinan tokoh-tokoh penting kelompok-kelompok ini? Bagaimanakah tokoh-tokoh penting kelompok-kelompok ini membentuk relasi satu sama lainnya dan membentuk relasi dengan aparat dan pejabat pemerintah serta warga masyarakat biasa?

Pendekatan di dalam penelitian ini adalah diakronik. Pendekatan historis dan antropologis digunakan di dalam penelitian ini. Peristiwa-peristiwa sejarah dalam masyarakat yang kompleks seperti masyarakat di Jawa tidaklah mungkin dipahami tanpa berkonsultasi dengan informasi kesejarahan. Namun, data kronologis saja tidaklah cukup dalam memahami kompleksitas

dan hubungan-hubungan antara aktor-aktor di dalam seluruh peristiwa-peristiwa sosial, politik, budaya, dan religius di dalam penelitian ini.

Kekerasan adalah kategori budaya, bentuk konstruksi yang berkembang secara historis. Pandangan tentang kekerasan selalu dibatasi oleh ruang dan waktu dan sebagian besar tergantung pada mereka yang terlibat di dalamnya, apakah mereka adalah pelaku dan korban, penonton dan pengamat atau saksi dan pihak berwenang.

Seluruh empat kelompok *strongmen* dan kekerasan—rampok-bandit, jago, jawara, dan preman—mampu menjaga kekuasaan mereka karena masyarakat dari mana mereka berasal, sadar atau tidak, justru telah membantu mempertahankan eksistensi mereka. Namun demikian, masyarakat tidak bisa dianggap sebagai satu-satunya alasan yang menjaga kelangsungan hidup empat kelompok tersebut. Pihak yang berwenanglah, mulai dari masa pra-kolonial hingga saat ini yang telah memanfaatkan kekuatan-kekuatan ‘informal’ tersebut. Pihak yang berwenang jugalah yang dapat dianggap sebagai pembela dan pelindung dari budaya kekerasan di Indonesia.

Keywords: *Strongmen, Kekerasan Massa, Rampok-bandit, Jago, Jawara, Preman*

Kata Pengantar

Perkembangan kelompok-kelompok kekerasan massa di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan tren yang meningkat. Sepak terjang mereka sering membuat masyarakat khawatir. Sementara itu, negara sering tidak berdaya menghadapi tindak-tanduk mereka yang tidak jarang menghasilkan kerusakan dan menebar teror.

Di masa lalu, keadaan yang tidak jauh berbeda juga sering terjadi. Kelompok-kelompok yang dalam istilah umum dikenal sebagai *strongmen*, seperti jago dan jawara memiliki dualisme posisi di masyarakat. Di satu sisi mereka acapkali dibutuhkan karena kemampuan mereka menjadi penghubung antara negara dan masyarakat dan sebagai *fixer*, yaitu seseorang yang dapat menyelesaikan—biasanya—kasus hukum antara penduduk dan aparat keamanan. Di sisi lain, karena mereka memiliki kemampuan bela diri, mereka juga ditakuti dan sering menebar ketakutan ke masyarakat.

Pembahasan tentang *strongmen* dalam penelitian ini adalah individu-individu yang sering memperoleh reputasinya melalui ketakutan yang mereka sebarkan di antara masyarakat lokal. Perlu digarisbawahi bahwa konsep *strongmen* di sini berbeda dengan konsep *strongmen* dalam dunia politik. Yang terakhir didefinisikan sebagai pemimpin politik yang memimpin secara represif dan menjalankan pemerintahan yang otoriter, sedangkan yang pertama dijelaskan sebagai gangster lokal yang memperoleh keuntungan dari ketidakamanan di tingkat lokal untuk memperoleh pekerjaan, reputasi, dan yang mampu

mengumpulkan pengaruh sosial-politik ketika mereka terjun ke dunia politik.

Sementara itu, kelompok kekerasan yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah individu-individu yang baik berdiri sendiri maupun bergabung ke dalam kelompok tertentu yang juga sering memperoleh reputasinya melalui ketakutan yang mereka sebarkan di antara masyarakat lokal, seperti yang terjadi pada *strongmen*. Namun, ada perbedaan yang besar antara *strongmen* dan kelompok kekerasan di dalam studi ini, yaitu bahwa yang pertama bukanlah kelompok kriminal walaupun beberapa di antaranya mungkin terlibat dalam aktivitas kriminal, sedangkan yang kedua memang menjalankan aktivitas kriminal untuk memperoleh keuntungan material. Dalam segi kesamaan, keduanya sama-sama dikenal sebagai kelompok yang menyebarkan ketakutan dan kekerasan di antara masyarakat lokal untuk memperoleh reputasi dan berbagai macam keuntungan ekonomi, sosial, budaya, dan juga politik.

Selain membahas tentang kelompok *strongmen*, penelitian ini juga menelusuri akar kekerasan massa—termasuk di dalamnya kekerasan *strongmen*—di Indonesia. Saya berpendapat bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh *strongmen* tidak bisa dilihat hanya dari segi kekerasan itu sendiri, tetapi perlu dilihat dari aspek-aspek lain yang menyangkut aspek-aspek politik, sosial dan budaya. Walaupun kekerasan adalah fenomena global, ada garis tebal yang bisa dilihat untuk memulai diskusi tentang kekerasan di Indonesia, yaitu bahwa kebanyakan kekerasan adalah respon terhadap fenomena sosial-budaya yang menggejala di masyarakat.

Pembahasan tema-tema dalam penelitian ini disusun berdasarkan perspektif pembagian kelompok-kelompok *strongmen* dan kekerasan dalam sudut pandang ilmu sejarah. Dengan demikian, saya berharap agar penelitian ini dapat berguna untuk memperkaya paradigma berpikir baru dalam studi-studi mengenai kelompok *strongmen* dan kelompok-kelompok kekerasan massa di Indonesia yang mungkin akan berguna bagi masyarakat secara umum dan *civitas academica* IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan dapat dilaksanakan secara baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak. Karena itu sudah sepatutnya saya mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulisan buku ini. Ucapan terima kasih yang pertama saya tujukan kepada unsur pimpinan yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mendapatkan bantuan dana penulisan untuk buku dasar ini, dalam hal ini yaitu Rektor IAIN “SMH” Banten Prof. Dr. H.E. Syibli Syarjaya, L.M.L., M.M.; Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Drs. H.M.A. Djazimi, M.Pd., Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan Drs. Wazin, M.Si. Selain itu, saya juga berhutang budi kepada rekan-rekan di Laboratorium Bantenologi IAIN “SMH” Banten, terutama kepada Dr. Mufti Ali, Dr. Helmy Faizi Bahrul Ulumi, Dr. Ayatullah Humaeni, Ade Jaya Suryani, M.A., Rohman M.A. dan juga kepada Yadi Ahyadi, S.Ag.

Serang, Oktober 2014
Dr. Yanwar Pribadi, M.A.

Bab I

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Barangkali pada masa pasca-Orde Baru tidak ada tokoh masyarakat yang begitu terang-terangan, terbuka dan fenomenal di Banten selain Tubagus Chasan Sohib. Ia adalah ayah Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Banten periode 2006-2014, sekaligus pengusaha sukses, dan seorang tokoh legendaris dunia jawara di Banten.

Di Indonesia, kelompok-kelompok jawara adalah satu dari kelompok-kelompok *strongmen* (secara harfiah berarti orang kuat) yang telah lama mewarnai sejarah kelompok-kelompok sosial-budaya lokal dan sejarah kekerasan di Indonesia. Jawa di masa pemerintahan kolonial Belanda diwarnai oleh sepak terjang rampok-bandit dan kelompok-kelompok jago. Di Banten ada kelompok-kelompok jawara, dan di mana-mana di Indonesia, orang terbiasa atau setidaknya sering bersinggungan dengan kelompok-kelompok preman. Kelompok-kelompok *strongmen* dan kelompok-kelompok kekerasan telah dikenal relatif luas di banyak daerah di Indonesia. Namun, pembahasan tentang

strongmen dan kelompok kekerasan di dalam penelitian ini hanya akan terfokus pada kelompok-kelompok *strongmen* di Jawa, yaitu jago dan jawara, serta kelompok-kelompok kekerasan di tempat yang sama, yaitu rampok-bandit dan preman.

Penelitian ini akan difokuskan pada fenomena kekerasan massa di Indonesia, sejarah dan perkembangan *strongmen* dan kelompok kekerasan di Indonesia, dan sepak terjang mereka dalam bingkai budaya dan politik lokal. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah: Bagaimanakah latar belakang dan perkembangan kekerasan massa di Indonesia? Bagaimanakah latar belakang kemunculan kelompok-kelompok *strongmen* dan kelompok-kelompok kekerasan di Indonesia? Bagaimanakah perkembangan kelompok-kelompok ini? Bagaimanakah sepak terjang mereka dalam bingkai budaya dan politik lokal? Secara spesifik, pertanyaan-pertanyaan tentang kelompok-kelompok *strongmen* dan kelompok-kelompok kekerasan di Indonesia dapat diurai menjadi pertanyaan-pertanyaan seperti: Apakah sumber-sumber otoritas tokoh-tokoh penting kelompok-kelompok *strongmen* dan kelompok-kelompok kekerasan ini? Apakah strategi kepemimpinan

tokoh-tokoh penting kelompok-kelompok ini? Bagaimanakah tokoh-tokoh penting kelompok-kelompok ini membentuk relasi satu sama lainnya dan membentuk relasi dengan aparat dan pejabat pemerintah serta warga masyarakat biasa?

Tujuan

Menelusuri latar belakang dan perkembangan kekerasan massa di Indonesia; latar belakang kemunculan kelompok-kelompok *strongmen* dan kelompok-kelompok kekerasan di Indonesia; perkembangan kelompok-kelompok ini; dan sepak terjang mereka dalam bingkai budaya dan politik lokal adalah tujuan penelitian ini. Secara spesifik, tujuan penelitian ini juga berusaha untuk memahami sumber-sumber otoritas tokoh-tokoh penting kelompok-kelompok *strongmen* dan kelompok-kelompok kekerasan ini; strategi kepemimpinan tokoh-tokoh penting kelompok-kelompok ini; dan juga untuk memahami bagaimana tokoh-tokoh penting kelompok-kelompok ini membentuk relasi satu sama lainnya dan membentuk relasi dengan aparat dan pejabat pemerintah serta warga masyarakat biasa.

Signifikansi Penelitian

Untuk memahami dinamika masyarakat Indonesia modern, studi tentang kelompok-kelompok sosial tertentu serta tindak-tanduk mereka tidak bisa diabaikan begitu saja. Studi historis dan antropologis mengenai kelompok-kelompok *strongmen* dan kelompok-kelompok kekerasan di Indonesia, terutama di Jawa pada tingkat lokal sangatlah mendesak untuk ditulis karena beberapa alasan. Pertama, tidak banyak tulisan mengenai kelompok-kelompok ini. Kedua, sebagian pelaku sejarah dari kelompok-kelompok ini, terutama yang berkiprah pada masa Orde Baru seperti Tubagus Chasan Sochib, telah banyak yang meninggal.

Ada beberapa alasan mengapa kelompok-kelompok *strongmen* dan kelompok-kelompok kekerasan di Indonesia, terutama di Jawa pada tingkat lokal menjadi topik utama penelitian ini. Pertama, Jawa adalah wilayah terpenting di Indonesia, baik pada masa kolonial maupun pada era kemerdekaan di mana kelompok-kelompok sosial tertentu di wilayah tersebut, termasuk kelompok-kelompok *strongmen* dan kelompok-kelompok kekerasan, sering berperan dalam menentukan sejarah Indonesia. Kedua, sejumlah tokoh-tokoh utama kelompok-kelompok *strongmen*

dan kelompok-kelompok kekerasan di Indonesia, terutama di Jawa pada tingkat lokal seperti Tubagus Chasan Sochib, menduduki posisi penting di dunia politik dan domain budaya lokal. Ketiga, ada kekosongan cukup besar di dunia akademik yang berhubungan dengan tulisan-tulisan mengenai fenomena kekerasan massa dan sepak terjang kelompok-kelompok *strongmen* dan kelompok-kelompok kekerasan di Indonesia. Oleh karena itu, untuk merespon permasalahan di atas, penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan aspek-aspek spesifik di atas dan berkontribusi terhadap perdebatan ilmiah mengenai sejarah dan fenomena kelompok-kelompok sosial tertentu di Indonesia.

Dengan memfokuskan pada tingkat lokal,¹ penelitian ini juga diharapkan dapat menunjukkan bagaimana simbol-simbol budaya dan politik digunakan untuk memperkuat posisi tokoh-tokoh penting kelompok-kelompok *strongmen* dan kelompok-kelompok kekerasan di Jawa di mana kelompok-kelompok ini juga dapat ditemukan di daerah-daerah lain di Indonesia. Aktor-aktor seperti

¹ Tergantung konteks, lokal dapat berarti desa, kabupaten, atau bahkan provinsi.

rampok-bandit, jago, jawara, dan preman yang merupakan bagian dari dunia *strongmen* dan sangat dekat dengan dunia kekerasan dalam bingkai budaya dan politik lokal juga dapat ditemukan di Bali di dalam kelompok-kelompok pecalang atau di Sumatra Barat di dalam kelompok-kelompok parewa. Oleh karena itu, walaupun penelitian ini terfokus di Jawa, penelitian ini juga diharapkan dapat menawarkan analisis yang lebih luas dalam mengkaji fenomena kekerasan massa di Indonesia, sejarah dan perkembangan *strongmen* dan kelompok kekerasan di Indonesia, dan sepak terjang mereka dalam bingkai budaya dan politik lokal di daerah-daerah lain di Indonesia.

Kerangka Konseptual

Tema-tema di dalam penelitian ini didiskusikan secara spesifik di dalam konteks formasi dan transformasi budaya dan politik lokal di Jawa. Selain itu, sebagaimana yang akan kita lihat, aktor-aktor di dalam studi ini, tokoh-tokoh penting kelompok-kelompok *strongmen* dan kelompok-kelompok kekerasan di Jawa, adalah bagian dari konfigurasi yang lebih besar dari individu-individu yang saling bergantung satu sama lain dalam masyarakat di Jawa, dan Indonesia secara lebih luas.

Perkembangan kondisi pada masa kolonial, perkembangan politik yang lebih luas, dampak luas pemerintahan otoriter pada masa Orde Baru, pertumbuhan ekonomi, dan juga situasi pada era desentralisasi, semuanya berhubungan dengan perkembangan masyarakat secara luas di Jawa, yang pada akhirnya berdampak juga terhadap sepak terjang kelompok-kelompok *strongmen* dan kelompok-kelompok kekerasan di Jawa.

Pendapat-pendapat mengenai kekerasan di Indonesia telah diulas oleh beberapa penulis. Ingrid Wessel beranggapan bahwa kekerasan di Indonesia adalah warisan dari Orde Baru walaupun ia juga meyakini bahwa perjuangan untuk memperoleh kekuasaan dan barang-barang, untuk akses menuju perdagangan dan perjuangan melawan musuh pada masa pra-kolonial selalu terkoneksi dengan kekerasan (Wessel, 2001). Penciptaan *state of violence* (negara kekerasan) oleh pemerintah kolonial Belanda telah dibahas oleh Henk Schulte Nordholt (Schulte Nordholt, 2002). Freek Colombijn dan Thomas Lindblad mendukung pendapat ini dengan menegaskan bahwa kekerasan memiliki akar yang panjang jauh sebelum pemerintahan Suharto terbentuk (Colombijn dan Lindblad, 2002). Kees

van Dijk mengumpulkan penjelasan yang menyebabkan ledakan kekerasan di Indonesia, yaitu pada masa Orde Baru; tahun 1910an ketika Sarekat Islam didirikan menyusul adanya sentimen anti-Tionghoa; pembunuhan besar-besaran pada tahun 1948 dan 1965-1966; pemberontakan Darul Islam; dan masa-masa awal Revolusi Indonesia (Van Dijk, 2002). Ariel Heryanto membuat istilah 'state terrorism' (terorisme negara) untuk melabeli kekerasan yang marak pada masa Suharto. Lebih jauh lagi, ia berpendapat bahwa pembunuhan besar-besaran 1965-1966 adalah pondasi dasar gaya otoriter Orde Baru (Heryanto, 2006). Yang perlu juga diingat adalah bahwa aspek politik yang paling fundamental yang diharapkan disediakan oleh negara adalah keamanan (Schulte Nordholt dan Van Klinken, 2007: 26). Hal inilah yang mungkin tidak terlalu bisa diharapkan dari pemerintah Orde Baru. Setelah Tembok Berlin runtuh, Suharto menghadapi masalah serius dalam mempertahankan legitimasi pemerintahannya yang semakin menua. Rekaman video pembantaian Santa Cruz di Timor Timur pada bulan November 1991 tersebar luas ke seluruh dunia. Sementara itu, pada tahun 1996 markas Partai Demokrasi Indonesia (PDI) diserang

oleh sekelompok massa yang didukung oleh pemerintah. Tahun 1990an adalah suatu periode peningkatan kekerasan politik dan kriminalitas ketika gerakan protes dihadapkan kepada tindakan represif dan milisimilis bersenjata terlibat dalam kampanye-kampanye yang intimidatif dan perang antar kelompok-kelompok politik (Schulte Nordholt dan Van Klinken, 2007: 6).

Secara umum, tindak kekerasan yang dilakukan oleh *strongmen* tidak bisa dilihat hanya dari segi kekerasan itu sendiri, tetapi perlu dilihat dari aspek-aspek lain yang menyangkut aspek-aspek politik, sosial dan budaya. Walaupun kekerasan adalah fenomena global, ada garis tebal yang bisa dilihat untuk memulai diskusi tentang kekerasan di Indonesia, yaitu bahwa kebanyakan kekerasan adalah respon terhadap fenomena sosial-budaya yang menggejala di masyarakat.

Strongmen dalam penelitian ini adalah individu-individu yang sering memperoleh reputasinya melalui ketakutan yang mereka sebar di antara masyarakat lokal. Perlu digarisbawahi bahwa konsep *strongmen* di sini berbeda dengan konsep *strongmen* dalam dunia politik. Yang terakhir didefinisikan sebagai pemimpin politik yang

memimpin secara represif dan menjalankan pemerintahan yang otoriter, sedangkan yang pertama dijelaskan sebagai gangster lokal yang memperoleh keuntungan dari ketidakamanan di tingkat lokal untuk memperoleh pekerjaan, reputasi, dan yang mampu mengumpulkan pengaruh sosial-politik ketika mereka terjun ke dunia politik.

Sementara itu, kelompok kekerasan yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah individu-individu yang baik berdiri sendiri maupun bergabung ke dalam kelompok tertentu yang juga sering memperoleh reputasinya melalui ketakutan yang mereka sebarkan di antara masyarakat lokal, seperti yang terjadi pada *strongmen*. Namun, ada perbedaan yang besar antara *strongmen* dan kelompok kekerasan di dalam studi ini, yaitu bahwa yang pertama bukanlah kelompok kriminal walaupun beberapa di antaranya mungkin terlibat dalam aktivitas kriminal, sedangkan yang kedua memang menjalankan aktivitas kriminal untuk memperoleh keuntungan material. Dalam segi kesamaan, keduanya sama-sama dikenal sebagai kelompok yang menyebarkan ketakutan dan kekerasan di antara masyarakat lokal untuk memperoleh reputasi dan berbagai macam

keuntungan ekonomi, sosial, budaya, dan juga politik

Telaah Pustaka

Strongmen sering diasosiasikan dengan bandit (Hobsbawm, 1969), pengusaha kekerasan-*violent entrepreneur* (Blok, 1988), atau tokoh-tokoh revolusioner-*revolutionary* (Koliopoulos, 1987). Di ranah ilmu pengetahuan di Indonesia, ada sejumlah karya mengenai orang-orang yang distereotipekan sebagai orang-orang yang ‘gagah’ dan ‘berotot’ ini yang direpresentasikan sebagai bandit (Suhartono, 1995), pemimpin desa (Onghokham, 1978), perantara-*intermediary* (Onghokham, 1984), pemberontak (Cribb, 1991) atau pahlawan lokal, sekaligus juga broker politik, kriminal, dan orang-orang yang dianggap memiliki kekuatan magis (Schulte Nordholt, 1991).

Strongmen di Indonesia memiliki kemiripan dengan mafiosi Sisilia. Keduanya pada awalnya adalah fenomena pedesaan. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa mereka juga berbeda dalam hal-hal tertentu. Dalam studinya (1988), yang mendiskusikan mafiosi pedesaan di Sisilia barat pada abad ke-19 dan 20 melalui kajian mengenai jaringan sosial mereka yang luas, Anton Blok

mengungkapkan kondisi-kondisi di mana mafiosi menjadi kekuatan besar di pedalaman Sisilia barat dan menghubungkan mereka dengan tahapan khas dari perkembangan yang dicapai oleh masyarakat Italia secara luas, atau setidaknya wilayah pinggiran Italia bagian selatan secara khusus (1988: xxvii-xxviii). Menurut Blok, mafiosi adalah:

[r]ural entrepreneurs of sorts, who were until recently an outstanding feature of peasant communities in Sicily's western interior. Recruited from the ranks of peasants and shepherds, and entrusted with tasks of surveillance on the large estates (latifunda) of absentee landlords, they constituted a particular variety of middlemen (1988: xxvii-xxviii),

sedangkan mafia sendiri adalah bentuk kekerasan tanpa izin (illegal) (1988: 6).

Selain itu, menurut Gambetta (1993), mafia adalah '*a specific economic enterprise, an industry which produces, promotes, and sells private protection*' (1993: 1). Gambetta menegaskan hubungan penting antara mafia dengan negara. Ia berpendapat bahwa '*the parallel between the mafia and the state has clear limits, and consequently, that the view of the mafia as a legal system in its own right does not actually stand up*' (1993:

7). Studinya berkontribusi penting kepada penelitian tentang *strongmen* ini dengan menegaskan bahwa '*mafiosi are not entrepreneurs primarily involved in dealing with illegal goods, nor are they entrepreneurs in the sense of handling violently the production of legal goods*' (1993: 9). Proposisi ini tidak diragukan lagi juga ditemukan di dalam karakteristik kelompok-kelompok *strongmen* di dalam penelitian ini; bahwa mereka bukanlah sekedar pelaku-pelaku kriminal dalam konteks budaya dan politik lokal di Jawa.

Metode Penelitian

Pendekatan di dalam penelitian ini adalah diakronik. Pendekatan historis dan antropologis digunakan di dalam penelitian ini. Peristiwa-peristiwa sejarah dalam masyarakat yang kompleks seperti masyarakat di Jawa tidaklah mungkin dipahami tanpa berkonsultasi dengan informasi kesejarahan. Namun, data kronologis saja tidaklah cukup dalam memahami kompleksitas dan hubungan-hubungan antara aktor-aktor di dalam seluruh peristiwa-peristiwa sosial, politik, budaya, dan religius di dalam penelitian ini.

Untuk mengeksplorasi peristiwa-peristiwa masa lalu, melihat sejarah rampok-bandit dan jago, dan juga untuk mencari kerangka konseptual, studi

arsip dan studi pustaka (*archival and library research/fieldwork*) dilakukan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) dan sejumlah perpustakaan-perpustakaan lain. Untuk mengeksplorasi peristiwa-peristiwa “masa kini” (karena sesungguhnya tidak ada peristiwa masa kini dalam konsep ilmu sejarah), sejumlah studi lapangan akan dilaksanakan di sejumlah tempat yang dikenal sebagai “gudang” *strongmen* dan kelompok-kelompok kekerasan, seperti jawara dan preman, di sejumlah tempat di Banten dan Jakarta. Kedua periode studi lapangan ini dilaksanakan dalam waktu yang relatif bersamaan.

Ini adalah penelitian dengan perspektif sejarah dan antropologi. Ketika melakukan studi lapangan, peneliti tidak hanya akan bersinggungan dengan pengalaman individu tokoh-tokoh penting kelompok-kelompok *strongmen* dan kelompok-kelompok kekerasan pada titik tertentu pada saat peneliti akan turun ke lapangan, tapi juga akan berkonsentrasi dalam peristiwa-peristiwa masa lalu yang masih terekam oleh mereka. Namun, karena penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian antropologi, “peristiwa masa kini” juga

akan menjadi perhatian peneliti ketika peneliti melaksanakan observasi, partisipasi, interviu, obrolan, dan *hang-out* di tempat-tempat tertentu bersama mereka.

Bab II

Fenomena Kekerasan Massa di Indonesia

Pendahuluan

Barangkali tidak ada tokoh masyarakat yang begitu terang-terangan dan terbuka di Banten pasca-Suharto selain Tubagus Chasan Sochib. Ia adalah ayah Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Banten saat ini (periode 2006-2015), sekaligus pengusaha sukses, dan yang lebih penting lagi, ia adalah seorang tokoh legendaris dunia jawara di Banten.

Di Indonesia, kelompok-kelompok jawara adalah satu dari kelompok-kelompok *strongmen* yang telah lama mewarnai sejarah kelompok-kelompok sosial-budaya lokal dan sejarah kekerasan di Indonesia. Jawa di masa pemerintahan kolonial Belanda diwarnai oleh sepak terjang rampok-bandit dan kelompok-kelompok jago. Di Banten ada kelompok-kelompok jawara, dan di mana-mana di Indonesia, orang terbiasa atau setidaknya sering bersinggungan dengan kelompok-kelompok preman. Kelompok-kelompok *strongmen* telah dikenal relatif luas di banyak daerah di Indonesia.

Menelusuri akar kekerasan massa—termasuk di dalamnya kekerasan *strongmen*—di Indonesia adalah tujuan bab ini. Saya berpendapat bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh *strongmen* tidak bisa dilihat hanya dari segi kekerasan itu sendiri, tetapi perlu dilihat dari aspek-aspek lain yang menyangkut aspek-aspek politik, sosial dan budaya. Walaupun kekerasan adalah fenomena global, ada garis tebal yang bisa dilihat untuk memulai diskusi tentang kekerasan di Indonesia, yaitu bahwa kebanyakan kekerasan adalah respon terhadap fenomena sosial-budaya yang menggejala di masyarakat.

Kekerasan Massa dalam Literatur

Pendapat-pendapat mengenai kekerasan di Indonesia telah diulas oleh beberapa penulis. Ingrid Wessel beranggapan bahwa kekerasan di Indonesia adalah warisan dari Orde Baru walaupun ia juga meyakini bahwa perjuangan untuk memperoleh kekuasaan dan barang-barang, untuk akses menuju perdagangan dan perjuangan melawan musuh pada masa pra-kolonial selalu terkoneksi dengan kekerasan (Wessel, 2001). Kemudian, penciptaan *state of violence* (negara kekerasan) oleh pemerintah kolonial Belanda telah dibahas oleh Henk Schulte

Nordholt (Schulte Nordholt, 2002). Freek Colombijn dan Thomas Lindblad mendukung pendapat ini dengan menegaskan bahwa kekerasan memiliki akar yang panjang jauh sebelum pemerintahan Suharto terbentuk (Colombijn dan Lindblad, 2002). Kees van Dijk mengumpulkan penjelasan yang menyebabkan ledakan kekerasan di Indonesia, yaitu pada masa Orde Baru; tahun 1910an ketika Sarekat Islam didirikan menyusul adanya sentimen anti-Tionghoa; pembunuhan besar-besaran pada tahun 1948 dan 1965-1966; pemberontakan Darul Islam; dan masa-masa awal revolusi kemerdekaan Indonesia (Van Dijk, 2002). Ariel Heryanto membuat istilah '*state terrorism*' (terorisme negara) untuk melabeli kekerasan yang marak pada masa Suharto. Lebih jauh lagi, ia berpendapat bahwa pembunuhan besar-besaran 1965-1966 adalah pondasi dasar gaya otoriter Orde Baru (Heryanto, 2006). Yang perlu juga diingat adalah bahwa aspek politik yang paling fundamental yang diharapkan disediakan oleh negara adalah keamanan (Schulte Nordholt dan Van Klinken, 2007: 26). Hal inilah yang mungkin tidak terlalu bisa diharapkan dari pemerintah Orde Baru.

Setelah Tembok Berlin runtuh, Suharto menghadapi masalah serius dalam mempertahankan legitimasi pemerintahannya yang semakin menua. Rekaman video pembantaian Santa Cruz di Timor Timur pada bulan November 1991 tersebar luas ke seluruh dunia. Sementara itu, pada tahun 1996 markas Partai Demokrasi Indonesia (PDI) diserang oleh sekelompok massa yang didukung oleh pemerintah. Tahun 1990an adalah suatu periode peningkatan kekerasan politik dan kriminalitas ketika gerakan protes dihadapkan kepada tindakan represif, dan ketika milisi-milisi bersenjata terlibat dalam kampanye-kampanye yang intimidatif dan perang antara kelompok-kelompok politik (Schulte Nordholt dan Van Klinken, 2007: 6).

State of Violence

Perjuangan merebut kekuasaan menggunakan kekuatan fisik yang menyebabkan bahaya bagi pihak lain dapat menyebabkan terciptanya kekerasan politik. Hal tersebut dapat dilihat ketika penjelajahan VOC pada dekade terakhir abad ke-17 di Malaka, Makassar dan Banten dan juga perluasan ekspansi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 menyebabkan timbulnya fenomena

kekerasan massa yang diderita oleh penduduk Nusantara. Nampaknya, pemerintah kolonial Belanda telah mewariskan *state of violence* kepada orang Indonesia. Penekanan yang kuat ditujukan kepada periode setelah 1830 ketika pemerintah kolonial Belanda mulai menerapkan *regime of fear* (rezim ketakutan). Salah satu alasan penerapan itu adalah karena mereka kekurangan staf dan aparat keamanan. Bahkan, pemerintah kolonial juga dianggap memberikan kesempatan kepada kriminal-kriminal untuk melanggengkan kekuatan mereka (Schulte Nordholt, 1991&2002 dan Schulte Nordholt & Van Till, 1999).

State of violence tidak hanya diindikasikan oleh tindakan represif Belanda dalam melancarkan peperangan di Hindia Belanda atau ketika merespon gerakan protes petani yang marak pada abad ke-19 dan ke-20 di Jawa, namun juga diindikasikan oleh penerapan berbagai macam hukum yang diskriminatif. Kekuasaan pemerintah kolonial melemahkan kekuatan priyayi (bangsawan lokal). Dengan memasukkan bupati dan anak-anaknya ke pemerintahan, penguasa kolonial memberikan posisi birokrat dan otoritas Barat dan menjauhkan mereka dari sistem patrimonial di mana sebelumnya

mereka menjadi bagian integralnya. Priyayi, pejabat tinggi dan pejabat militer tergabung dalam naungan hukum untuk orang Eropa, sedangkan masyarakat pribumi awam—yang menentang penerapan pajak yang tinggi atau ‘kerja paksa’—bersama dengan orang-orang Tionghoa, Arab dan India (pemerintah kolonial menamai mereka orang-orang Timur Jauh) tunduk kepada aturan-aturan hukum berbeda yang dibuat untuk mengatur mereka (hukum adat). Perbedaan ini yang berdasarkan kepada status ras seseorang menentukan di mana seseorang bisa hidup, pajak apa yang harus dibayar, dan juga hukuman apa yang diterapkan jika mereka melanggar hukum. Ironisnya, bagian-bagian yang paling represif dari struktur hukum kolonial diadopsi di sistem hukum Indonesia pasca kemerdekaan (Emmerson, 1976: 40, Rush, 1990: 14-1, dan Lev, 1999). Selain itu, James Siegel juga menawarkan penjelasan lain untuk melihat peranan kriminal pada masa kolonial. Tulisan-tulisan yang dibuat oleh orang-orang Indo-Eropa (Eurasia) tentang kriminalitas dan kriminal sangatlah banyak pada masa itu. Orang-orang Indo-Eropa tersebut lambat laun kehilangan kontak dengan ayah mereka yang berbangsa Belanda pada akhir abad ke-19 dan

awal abad ke-20. Mereka berusaha mengidentifikasi diri mereka dengan pemerintah kolonial melawan kriminal-kriminal yang digambarkan oleh mereka sebagai orang-orang pribumi (Siegel, 1999).

Kini terlihat jelas bahwa saya tidak sependapat dengan pendapat Wessel yang menegaskan bahwa kekerasan adalah warisan Orde Baru. Hal tersebut terjadi karena gambaran akar kekerasan di Indonesia dapat ditelusuri hingga masa kolonial atau bahkan jauh sebelum orang-orang Eropa datang, jauh sebelum pemerintah otoriter Orde Baru mengadopsi *state of violence* dan menerapkan warisan kolonial tersebut.

Kekerasan Massa pada Masa Pra-kolonial

Timbulnya kekerasan massa yang terjadi di Indonesia, khususnya di Jawa nampaknya disebabkan oleh elemen-elemen tertentu dari kondisi sosial-budaya masyarakat Indonesia dan juga sistem pemerintahan kolonial Belanda yang membawahi dan mengatur urusan lembaga-lembaga birokratik masyarakat pribumi. Saya berpendapat bahwa walaupun orang-orang Jawa digambarkan sebagai '*a palladium of peace*' (Schulte Nordholt, 2002: 39) atau '*the meekest people in the world*' (Colombijn, 2001: 26) atau '*the most gentle people on*

earth' (Cribb, 2005: 44); dan juga Indonesia berada di posisi ke-67 dalam Indeks Perdamaian Global atau Global Peace Index (berada di atas Republik Rakyat Tiongkok yang menduduki peringkat ke-80, Amerika Serikat peringkat 85, dan India peringkat 128 - sebagai empat negara dengan penduduk terbanyak di dunia yang menyumbang 45 persen penduduk dunia), Indonesia secara umum dan juga secara historis adalah negara yang penuh dengan kekerasan.

Kondisi keamanan Indonesia pada masa prakolonial secara umum sering ditandai oleh perbanditan dan reaksi fisik atas perbanditan tersebut. Perkembangan perbanditan didorong oleh kelemahan kerajaan-kerajaan tradisional di Nusantara dalam memelihara perdamaian dan ketertiban. Selain itu, daerah-daerah di Nusantara juga sering mengalami masa paceklik dan krisis-krisis sosial yang berkaitan dengan kekeringan, banjir, dan wabah penyakit yang menghancurkan kawasan pertanian dan yang akhirnya memperburuk kehidupan masyarakat. Taraf kehidupan yang jauh dari tingkat sejahtera tersebut tentu saja membuat sebagian besar wilayah Nusantra rawan terhadap kejahatan. Kita dapat melihat bahwa secara garis

besar perbandingan yang terjadi mengarah kepada sektor properti. Target utama kejahatan tersebut adalah petani, baik petani tingkat besar maupun petani tingkat kecil. Rumah tangga petani miskin yang tidak mampu mengoptimalkan potensi-potensi yang mereka miliki adalah target yang mudah bagi para rampok-bandit. Akibat dari kondisi tersebut, kerajaan-kerajaan tradisional tersebut sering berusaha menyelesaikan masalah kejahatan dengan cara kekerasan.

Selain itu, masa pra-kolonial pun lazim ditandai dengan tradisi kekerasan massa yang khas. Dalam studinya, Colombijn telah menganalisis dua di antaranya, yaitu pengayauan dan amok (Colombijn, 2001 : 27-29). Saya menambahkan satu lagi, yaitu carok, tradisi kekerasan Madura yang seperti pengayauan dan amok, masih ada hingga saat ini. Selain faktor-faktor di atas, masih ada beberapa faktor lain yang akan saya diskusikan.

Masa Kekuasaan Orang-orang Eropa

Setelah orang-orang Eropa datang dan terutama setelah kongsi dagang Hindia Belanda (VOC) terbentuk dan berusaha memonopoli perdagangan dengan menaklukkan wilayah-wilayah yang strategis, orang-orang Belanda memperburuk kelemahan

kerajaan-kerajaan tradisional. Ekspansi agresif VOC dalam pencarian rempah-rempah dan pelabuhan-pelabuhan vital di Malaka, Maluku, Makassar dan Banten sering ditandai dengan peperangan dan kekerasan. Seperti kebanyakan gubernur jenderal Hindia Belanda, Jan Pieterszoon Coen dianggap sebagai pahlawan nasional di Belanda. Namun, bagi penduduk Nusantara ia dianggap sebagai salah satu pejabat VOC yang paling kejam (Milton, 1999). Di samping perang-perang kolonial yang sering terjadi setelah Belanda secara resmi membangun koloninya lewat pendirian Hindia Belanda, pembangunan Jalan Raya Pos yang menghubungkan Anyer di Jawa bagian barat dan Panarukan di Jawa bagian timur (setelahnya jalan raya tersebut menghubungkan Anyer dengan Banyuwangi) yang memakan ribuan korban jiwa juga adalah sebuah periode yang penuh dengan kekerasan. Arsitek jalan tersebut, Herman Willem Daendels atau Tuan Besar Guntur, sebagaimana penduduk pribumi memanggilnya, dipandang oleh masyarakat sebagai '*Iron Marshall*' yang otoriter (Nas dan Pratiwo, 2002).

Jawa pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 mengalami rentetan perlawanan petani. Sartono Kartodirdjo nampaknya menyederhanakan

penyebab-penyebab perlawanan-perlawanan tersebut dengan menunjukkan faktor ekonomi sebagai penyebabnya. Dalam karya besarnya tentang Pemberontakan petani Cilegon tahun 1888, ia menyelidiki revivalisme keagamaan di Banten pada abad ke-19. Peningkatan aktivitas keagamaan tersebut terjadi tidak hanya karena fakta bahwa orang Banten adalah penganut Islam yang taat, tetapi juga karena adanya gangguan keamanan dan ketertiban, dan secara bersamaan mendorong terjadinya perlawanan sosial. Oleh karena itu, revivalisme Islam di Banten dapat diidentifikasi sebagai gerakan politik keagamaan yang mengakomodasi beragam ketegangan sosial (Kartodirdjo, 1978 : 5 dan 1966 : 140-141). Menariknya, dalam karya yang lain ia menekankan pentingnya kelompok-kelompok keagamaan yang tidak dipercayai oleh pemerintah kolonial dan ia juga menggarisbawahi potensi mereka untuk melancarkan agitasi politik dan kebencian terhadap priyayi dan pemerintah kolonial (Kartodirdjo, 1972 : 89-90). Namun, saya berpendapat bahwa perlawanan-perlawanan tersebut dapat juga digolongkan sebagai gerakan keagamaan, karena institusi-institusi keagamaan seperti tarekat dan

komunitas-komunitas keagamaan lainnya juga memainkan peran penting dalam gerakan-gerakan tersebut. Pemicu yang memungkinkan dari peristiwa-peristiwa tersebut kemungkinan besar adalah kebencian terhadap dominasi orang-orang Belanda dan juga kemarahan terhadap orang-orang asing lain yang pada akhirnya bersatu dengan gerakan-gerakan keagamaan yang ekstrim (Pribadi, 2008 : 15-16).

Masa Revolusi Kemerdekaan

Jika kita bertanya tentang periode mana di Indonesia yang paling penuh dengan kekerasan sebelum pemerintahan Suharto berkuasa, John Smail (1964), Benedict Anderson (1972), Anthony Reid (1979), Anton Lucas (1981), Geoffrey Robinson (1988), dan Robert Cribb (1991) akan merujuk kepada periode revolusi kemerdekaan Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan 1945 hingga pengakuan kedaulatan tahun 1949 ketika perebutan kekuasaan berlangsung secara dramatis di berbagai pelosok Indonesia. Pada masa revolusi kemerdekaan terjadi banyak peristiwa perlawanan sosial. Indonesia pada masa tersebut adalah periode yang sedang bergejolak seiring dengan adanya faksi-faksi elit politik dan gerombolan-gerombolan

revolusioner bersenjata yang menghadang kekuatan asing untuk mengambil kembali wilayahnya yang pernah mereka kuasai. Karena sering ditekan secara mendalam oleh pemerintah kolonial—yang ditandai dengan penggunaan kekerasan selama ratusan tahun—gerombolan-gerombolan revolusioner tersebut merespon dengan menyebarkan teror yang menyebabkan jatuhnya korban di kedua belah pihak. Seluruh proses kemerdekaan mengakibatkan trauma yang mendalam bagi kebanyakan penduduk pribumi. Di dalam periode tersebut hampir tidak pernah ada keharmonisan sosial di masyarakat. Ini adalah periode di mana penjelasan yang menyeluruh seharusnya dilakukan dengan melihat latar belakang sosial-ekonomi, konteks politik, kepemimpinan, ideologi dan masalah-masalah militer.

Ketika kita mendiskusikan revolusi kemerdekaan Indonesia, kita tidak hanya perlu membicarakan jumlah orang yang siap bertempur dan meninggal dalam perjuangan mempertahankan negara atau bagaimana kekuatan asing berusaha memperoleh kembali koloni mereka. Kita tahu bahwa selain atas nama identitas nasional, identitas-identitas lainnya, seperti identitas yang berdasarkan kepada kelas, etnisitas dan agama juga bermunculan

pada saat itu. Lebih lanjut, dalam revolusi di negara-negara lain, intensitas pengabdian dan dedikasi juga merupakan sebuah fakta yang biasanya berjalan beriringan dengan komitmen masyarakat yang mengarahkan mereka untuk mengabdikan dan mengorbankan diri mereka sendiri untuk kepentingan negara. Proposisi ini sejalan dengan konsep '*imagined political community* (komunitas politik yang dibayangkan)' dari Benedict Anderson, di mana ia berpendapat bahwa '*imagined political community*' membuat masyarakat berbagi identitas bersama dengan orang lain yang tidak pernah mereka temui, tidak mungkin akan dilihat, bertemu atau berbicara dengannya (Anderson, 1983 : 6). Selain itu, revolusi kemerdekaan Indonesia adalah sebuah periode yang sangat heroik secara absolut dalam sejarah Indonesia. Murid-murid Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas diajarkan bagaimana para pejuang kemerdekaan adalah patriot-patriot bangsa. Keberanian para pemuda disimbolkan dalam bentuk bambu runcing dan ikat kepala merah-putih. Hari kemerdekaan 17 Agustus selalu dirayakan di seluruh wilayah Indonesia dan oleh karena itu menciptakan sejarah yang kurang berimbang. Perbanditan, milisi, kebrutalan,

kekacauan dan kekerasan selama revolusi yang bersimbah darah tersebut belum mendapat tempat dalam sejarah Indonesia (Schulte Nordholt, 2002 : 52).

Namun, semua penjelasan di atas belum menjelaskan bahwa di dalam periode tersebut brigade-brigade bersenjata justru menemukan momen berharganya. Kriminalitas merajalela sejalan dengan ambigunya hubungan antara negara dan kriminal. Di Jakarta gangster dan kaum nasionalis muda sayap kiri membentuk koalisi yang memainkan peranan penting antara 1945-1949. Koalisi tersebut secara luar biasa dapat bertahan walaupun revolusi akhirnya tidak dapat bertahan lagi karena mendapat tekanan dari kekuatan Belanda dan pemerintah Indonesia (Cribb, 1991: 2).

Apa sebenarnya yang membuat sikap para pemuda dapat bertahan selama revolusi? Jawabannya—sejalan dengan '*imagined political community*'—mungkin dapat ditelusuri dalam konsep 'identitas nasional'. Telah dikemukakan bahwa identitas nasional berasal dari konsep tentang kesamaan kampung halaman, ingatan sejarah dan mitos, dan identitas nasional memainkan bagian penting dalam elemen-elemen komunitas etnis,

seperti kesamaan perasaan solidaritas (Smith, 1991: 21). Dalam perasaan inilah para pemuda menekan Jepang untuk mempercepat kemerdekaan dan mengkritik tokoh-tokoh tua yang cenderung lambat dan terlalu berhati-hati dalam merespon situasi yang sedang berubah. Bagi para pemuda, proklamasi kemerdekaan yang segera dan otonom sangatlah penting sebagai ekspresi simbolis pembebasan dan penentuan nasib sendiri (Anderson, 1972: 70-71).

Para pemuda—di seluruh Jawa—bersama-sama dengan masyarakat kebanyakan mengambil alih kekuasaan dari Jepang hingga Agustus 1945. Pada mulanya mereka biasanya mengambil alih kantor-kantor pemerintah di mana konsentrasi terpusat di sana. Lambat laun, gerakan menyebar termasuk mengambil alih semua hal yang dikuasai Jepang. Di Bandung, masa-masa radikal dimulai dengan mengambil alih kantor-kantor pemerintah. Kelompok-kelompok pemuda yang terorganisasi di dalam kantor-kantor tersebut bertanggung jawab akan tindakan yang mereka lakukan. Dalam waktu enam bulan, perubahan besar berlangsung dalam tatanan sosial-politik di wilayah Bandung, di mana beberapa hal merupakan perubahan permanen. Seperti daerah-daerah lain, revolusi nasional di

Bandung juga merupakan periode kekerasan (Smail, 1964: 54-55 dan 156). Penculikan, penyerangan, perkosaan dan pembakaran merupakan pemandangan sehari-hari. Tindakan-tindakan kekerasan tersebut ditujukan kepada orang-orang Belanda, Tionghoa dan orang-orang asing lainnya dan juga orang-orang yang sebelumnya pernah memegang kekuasaan yang dianggap sebagai pengkhianat (Van Wulfften Palthe (a), 1949: 7-8). Para pemuda mengorganisasi diri mereka sendiri dalam kelompok-kelompok lokal dan meneror wilayah pedesaan. Selain itu ada juga angkatan bersenjata daerah di beberapa wilayah di mana kelompok-kelompok Muslim bersatu dalam Hizbullah dan Sabilillah, sedangkan kelompok-kelompok yang lain bisanya muncul dengan nama-nama yang didramatisasi, seperti Beruang Merah, Harimau Liar, dan Banteng Hitam (Van Wulfften Palthe (a), 1949: 14-15). Di Jakarta, pendudukan Jepang membuat dunia bawah tanah memiliki kesempatan untuk muncul ke permukaan karena adanya perubahan politik besar-besaran. Kelompok-kelompok milisi mengarahkan perhatiannya kepada rumah-rumah tuan tanah dan para pedagang. Gerombolan-gerombolan maut di selatan Batavia

mengincar orang-orang Eropa dan Tionghoa yang melarikan diri ke gunung, sedangkan di sebelah timur korbannya adalah orang-orang Tionghoa lokal (Cribb, 1991: 38-39). Sebagai tambahan, gerombolan-gerombolan revolusioner juga mengarahkan serangan mereka terhadap angkatan bersenjata. Sebagai contoh, pada tanggal 19 Oktober 1945, 86 prajurit Angkatan Laut Jepang yang sedang dalam perjalanan menuju Ciater dibunuh di Bekasi. Sebulan kemudian, pada tanggal 23 November, sekelompok prajurit Inggris yang berasal dari India dihabisi ketika pesawat mereka jatuh dekat Bekasi (Cribb, 1991: 54).

Bagaimana mungkin dalam kondisi tertentu, identitas nasional justru mendorong terjadinya tindakan kekerasan? Bangsa dan negara terhubung kepada usaha-usaha untuk menentukan nasib sendiri atas nama otoritas, teritori, dan kekuasaan politik. Hal tersebut membuat kekerasan sangat mungkin terjadi karena adanya kesempatan kehilangan kontrol atas negara dan dominasi kekuasaan di seluruh wilayah. Hal tersebut ditunjukkan secara jelas di dalam konsep otonomi politik (Smith, 2001: 9-31). Konsep otonomi politik mungkin cocok dalam konflik politik di Bali pada

masa-masa awal revolusi. Kekacauan, kerusuhan, dan ketidakteraturan sangat merajalela dan bahkan teror menjadi semakin nyata ketika tentara Belanda datang ke Indonesia pada bulan Maret 1946. Kini terlihat jelas bahwa kerajaan-kerajaan di Bali mengalami huru-hara dan konflik politik sebagai akibat perlawanan kuat di sebagian wilayah pulau tersebut akibat kembalinya orang-orang Eropa (Robinson, 1988). Oleh karena itu, kompetisi, konflik, dan kekerasan antar negara menjadi hal utama dalam hal kemunculan negara bangsa sebagaimana yang terjadi di Bali.

Masa Orde Baru

Tidak diragukan lagi, dua puluh tahun setelah kemerdekaan Indonesia, kita menyaksikan permulaan periode yang paling penuh dengan kekerasan dalam sejarah Indonesia. Orde Baru yang menggantikan Orde Lama berdiri sebagai akibat kudeta dan pembunuhan besar-besaran yang mengakibatkan hilangnya lima ratus ribu hingga sejuta nyawa manusia. Pembunuhan besar-besaran tersebut adalah akibat dari kegagalan revolusi yang dikenal dengan nama Gerakan 30 September/PKI (G30S/PKI). Akibatnya, orang-orang yang diduga sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI)

menjadi korban pembunuhan massal. Partai dan ideologinya, termasuk para pendukungnya segera diberantas dari Indonesia. Walaupun Angkatan Darat mendorong terjadinya pembunuhan, sebagian besar tindakan kekerasan justru dilakukan oleh masyarakat sipil bersenjata, seperti sayap pemuda NU, Ansor. Di Bali, kelompok seperti ini yang paling terkenal adalah Tameng. Mereka terdiri dari anggota-anggota militan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang berpakaian hitam-hitam dan dipersenjatai oleh pisau, tombak dan senjata api. Ansor dari Jawa Timur juga turut serta dalam aksi-aksi di Bali tersebut (Eklöf, 2002 : 124-125).

Pendapat Nugroho Notokusanto tentang Orde Baru dapat memperlihatkan bagaimana anggapan tentang PKI yang beredar di masyarakat:

Ide tentang negara ini di Indonesia disebut Orde Baru. Dilihat secara historis, Orde Baru dimulai sejak peristiwa 1 Oktober 1965 ; oleh karena itu mungkin sangat pantas mengakhiri kisah usaha kudeta “Gerakan 30 September” dengan kemunculan Orde Baru (Notokusanto dan Saleh, 1968: 79).

Pembunuhan massal tersebut membuka jalan bagi rezim Orde Baru untuk menciptakan 'terorisme negara' (*state terrorism*) untuk merujuk kepada kekerasan yang terjadi pada periode tersebut (Heryanto, 2006) atau membuat 'rezim ketakutan' (*regime of fear*) untuk merujuk kepada bentuk-bentuk represi terhadap hampir seluruh aksi protes kepada negara (Schulte Nordholt, 2002 : 44). Walaupun pemerintahan yang baru bersifat otoriter, namun pihak-pihak yang berkuasa hampir tidak berbuat apa-apa untuk mengawasi implementasi hukum di tingkat bawah. Tradisi vigilantisme di mana komunitas lokal menjadi otonom dalam mengidentifikasi dan menghukum kejahatan menjadi pemandangan sehari-hari. Pembunuhan massal 1965-1966 berlangsung dan dibenarkan oleh ide-ide vigilantisme (Cribb, 2005: 57).

Aspek lain kekerasan dalam sejarah Orde Baru adalah usaha-usaha pemusnahan di Timor Timur yang dimulai sejak tahun 1976. Penyerbuan tahun 1975 yang berhasil dan aneksasi Timor Timur pada tahun 1976 membuat daerah tersebut menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akibatnya, sebagian masyarakat yang tidak setuju

akan hal tersebut sering melakukan perlawanan untuk memerdekakan diri. Angkatan bersenjata Indonesia meresponnya dengan melaksanakan serangkaian aksi-aksi militer hingga sekitar tahun 1980. Selama masa pendudukan oleh Indonesia, diperkirakan jumlah penduduk Timor Timur yang meninggal sekitar 200.000 orang. Salah satu alasan mengapa Timor Timur diinvasi adalah karena Suharto khawatir orang-orang sayap kiri Timor Timur mungkin akan menyediakan tempat yang aman untuk orang-orang komunis. Kekhawatiran ini ditujukan kepada Fretilin, sebuah faksi lokal di Timor Timur (Cribb, 2002: 230). Walaupun tensi politik pada tahun 1965-1966 tidak dapat dibandingkan dengan periode pendudukan Timor Timur, nampaknya komunisme merupakan hal yang sama yang menjadi latar belakang mengapa pemerintahan Suharto melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat. Akibatnya, seluruh tindakan yang berkaitan dengan komunisme atau dicurigai memiliki aspek-aspek komunisme langsung dihabisi sehingga membuat rezim Orde Baru sangat represif.

Rezim Orde Baru nampaknya begitu mudah melakukan penetrasi ke masyarakat dan

mendominasi masyarakat lokal dibandingkan dengan pemerintah kolonial. Orde Baru juga merupakan sebuah awal pemerintahan neo-kolonial baru yang berjangka panjang. Lebih jauh, selain dominasi pemerintah pusat yang kuat, elit-elit daerah mampu menunjukkan ketahanan yang luar biasa dan bahkan mereka mampu bertahan dari intervensi atasan-atasan mereka di Jakarta. Di samping mengangkat perwira militer dan eks-militer dalam posisi-posisi strategis, rezim Orde Baru juga merekrut agen-agen lokal mereka di daerah-daerah yang sebagian besar berasal dari golongan aristokrat. Di banyak tempat rezim Orde Baru dan elit-elit lama menunjukkan kebencian yang sama kepada kelompok kiri dan gerakan-gerakan Islam (Schulte Nordholt, 2003: 575). Komando Jihad (1977), Gerakan Jama'ah Imran (1981), kerusuhan Tanjung Priok (1984) dan Gerakan Pengacau Keamanan Warsidi Lampung (1989) adalah beberapa contoh bagaimana kelompok kiri dan gerakan-gerakan Islam bereaksi terhadap kebijakan anti-Islam Orde Baru. Namun, Orde Baru terlalu kuat untuk mereka. Dituduh mengorganisasi usaha-usaha untuk mendirikan sebuah negara Islam dan menolak Pancasila sebagai asas tunggal, mereka diberantas

secara efektif oleh rezim tersebut. Pemberantasan tersebut bersifat kejam dan hal tersebut menunjukkan bagaimana rezim Orde Baru dalam seluruh tingkatan masyarakat dapat bertindak sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

Secara ringkas, dalam masalah kekerasan, ada tingkatan-tingkatan yang mungkin dapat ditemukan di masyarakat Indonesia secara umum. Colombijn membagi tingkatan-tingkatan tersebut ke dalam empat tahap: 1. Kekerasan yang disebabkan oleh negara atau organ-organ negara (termasuk angkatan bersenjata), 2. Kekerasan oleh komunitas masyarakat (dijelaskan oleh batas-batas antar-etnis, antar-religi atau antar-desa), 3. Kekerasan oleh gangster dan milisi, 4. Kekerasan oleh individu-individu yang berkumpul dalam kerumunan sementara (seperti penonton sepakbola atau keroyokan) (Colombijn, 2005: 246-247). Colombijn berpendapat bahwa pandangan paling penting dalam menganggap bahwa kekerasan adalah praktik budaya adalah bahwa kekerasan merupakan tingkah laku yang dipelajari secara sosial. Masyarakat terbiasa dengan praktik-praktik kekerasan melalui sebuah proses yang dapat dijelaskan sebagai '*social learning*' (pembelajaran sosial) (Colombijn, 2005: 266).

Pengalaman Indonesia dengan kekerasan pada masa Orde Baru sebagian besar dapat dijelaskan oleh kategori pertama tahapan yang dijelaskan oleh Colombijn, yaitu bahwa kekerasan diproduksi oleh rezim Suharto.

Penutup

Akar sejarah kekerasan di Indonesia dapat ditelusuri hingga masa pra-kolonial ketika penggunaan kekerasan dilegitimasi secara sosial-budaya oleh norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, seperti yang ditunjukkan dalam praktik-praktik pengayauan, amok dan carok. Namun, saya tidak berpendapat bahwa orang Indonesia memiliki karakter kekerasan secara alami dan umum. Tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat adalah aksi-aksi yang mungkin dilakukan untuk mengekspresikan perilaku ritualistik, pembelaan harga diri, atau bahkan tidak lebih dari pesan yang ingin disampaikan kepada pihak tertentu. Kekerasan yang lebih melembaga kemudian justru diperkenalkan oleh penguasa-penguasa asing Eropa—dan juga Jepang—ketika ekspansi kolonial kemudian pada akhirnya menciptakan negara kekerasan (*state of violence*).

Bab III

Rampok-bandit pada Masa Kolonial Jawa

Pendahuluan

Pedesaan di Nusantara pada masa kolonial sangat rentan dan mudah diserang oleh pihak-pihak yang berniat tidak baik. Di Jawa pada masa tersebut terdapat tekanan yang cukup berat bagi masyarakat yang mengakibatkan penghasilan mereka tetap rendah dan tingkat pengangguran tinggi. Pedesaan secara umum tidak terhubung dengan baik dengan daerah-daerah lainnya. Pada waktu perpindahan penduduk dalam keadaan sulit dan perlindungan dari pemerintah kolonial pusat tidak menentu, penduduk pedesaan berada dalam keadaan yang rapuh dan mudah diserang. Pada masa-masa itu perbanditan merajalela dan hal tersebut justru bertentangan dengan reputasi Jawa sebagai tempat yang aman.

Studi tentang Perbanditan

Ketika kita mendiskusikan perbanditan, kita mungkin teringat akan Eric Hobsbawm. Ia menemukan istilah '*social banditry*' (perbanditan

sosial) (Hobsbawm, 1959: 1-29). Ia kemudian mengembangkan konsep tersebut dalam bukunya yang berjudul *Bandits* (Hobsbawm, 1969). Ia berpendapat bahwa: *'social banditry is universally found, wherever societies are based on agriculture (including pastoral economies), and consist largely of peasants and landless labourers ruled, oppressed and exploited by someone else—lords, towns, governments, lawyers, or even banks'* (perbanditan sosial ditemukan di mana-mana, di mana masyarakat berdasarkan pertanian (termasuk perekonomian perladangan), dan terdiri dari petani dan buruh tani yang tidak memiliki tanah yang dikuasai, ditekan dan dieksploitasi oleh orang lain—tuan tanah, pemerintah, pengacara, atau bahkan bank). Sejarawan sosial ini membedakan tiga jenis perbanditan: perampok bermartabat atau tipe Robin Hood, pejuang perlawanan primitif atau kelompok gerilya, dan penebar teror (Hobsbawm, 1969: 15). Lebih jauh, ia juga telah menjelaskan tentang tiga aspek perbanditan: 1. Sebuah fenomena ketidakpuasan sosial, atau yang berkaitan dengan hal tersebut; 2. Koeksistensi penting perbanditan dengan gerakan-gerakan pemberontakan sosial yang lebih ambisius atau juga umum; dan 3. Situasi yang

agak terbelakang atau primitif di mana perbanditan juga berperan dalam gerakan atau fenomena protes dan pemberontakan sosial (Hobsbawm, 1974: 142). Argumen-argumen Hobsbawm beberapa kali disebutkan dalam karya-karyanya. Salah satunya yang terpenting adalah argumennya bahwa bandit sosial adalah pelarian, orang-orang yang hidup di dalam masyarakat petani yang dianggap sebagai kriminal oleh negara tapi tidak oleh para petani karena musuh mereka sama dengan musuh para petani. Bahkan para petani melihat mereka sebagai pahlawan, juara, penebar teror, pejuang keadilan yang membuat para bandit sosial begitu dipuja oleh para petani (Hobsbawm, 1959; 1969 dan 1974). Hubungan antara petani dan banditlah yang membuat perbanditan menjadi 'sosial'. Lebih jauh, Hobsbawm menekankan peran penting petani sebagai kelompok di mana bandit berasal dan ia bahkan menekankan bagaimana petani menjadi pendukung penting para bandit berdasarkan kesamaan musuh mereka (Hobsbawm, 1974 : 143).

Salah satu pengkritik Hobsbawm, Anton Blok, berpendapat bahwa bandit sering meneror orang-orang miskin dan lemah dan bahwa ketergantungan antara tuan tanah, petani dan

bandit jauh lebih kompleks daripada perbanditan sosial, dan bahwa bandit sosial menurut Hobsbawm sebenarnya lebih dekat kepada mitos dan legenda daripada kenyataan (Blok, 1972 : 496 dan 2001 : 17 ; 20 ; dan 22). Selain itu, Blok berpendapat bahwa seluruh bandit adalah 'sosial' seperti manusia pada umumnya dan mereka terhubung dengan orang lain oleh ikatan-ikatan yang beraneka ragam. Untuk memahami perilaku bandit, kita perlu melihat kelompok-kelompok lain, kelas-kelas atau jaringan-jaringan dengan mana bandit membentuk konfigurasi spesifik yang terdiri dari individu-individu yang saling memiliki ketergantungan. Artinya bahwa bandit perlu perlindungan untuk beroperasi dan bertahan (Blok, 1972: 498 dan 2001: 18). Selain itu, Blok berkeberatan dengan perhatian Hobsbawm yang berlebihan terhadap petani dan bandit sendiri.

Pengkritik Hobsbawm yang lain, Pat O'Malley, juga mempertanyakan istilah 'petani' yang mendukung bandit sosial, dan juga istilah 'pra-kapitalis' atau 'pra-industri' yang dianggap oleh Hobsbawm sebagai 'kondisi yang penting dalam eksistensi perbanditan sosial' (O'Malley, 1979: 490). Untuk menunjukkan bahwa perampokan dapat

terjadi di luar dunia petani dan bahkan terlihat di masyarakat kapitalis, O'Malley menunjukkan geng Ned Kelly dan perebutan tanah antara tahun 1878 dan 1880 di Australia. Geng Kelly didukung oleh Bush Telegraph, sebuah jaringan informan yang memberikan informasi detil tentang gerak-gerik polisi. Informan-informan tersebut terdiri dari para 'pemilih' (petani kecil) dan pekerja-pekerja pedesaan lainnya. Dari sini, O'Malley berpendapat bahwa perlawanan Kelly adalah perjuangan kelas, mengingat fakta bahwa di samping polisi yang menjadi musuh mereka, para 'squatter' (peladang borjuis berskala besar) dan para profesional (pengacara, guru sekolah dan sebagainya) juga merupakan musuh para *bushranger*—buronan (Kelly dan gengnya). O'Malley mengambil kesimpulan bahwa modus operandi geng Kelly merefleksikan geng Robin Hood; yang berperang melawan musuh orang-orang miskin. Akibatnya, mereka mendapatkan rasa hormat dan dukungan dari orang-orang pinggiran tersebut. Ned Kelly merepresentasikan apa yang disebut Hobsbawm sebagai bandit sosial. Namun, Kelly tidak tumbuh di lingkungan 'pra-kapitalis' atau 'petani tradisional' di mana Hobsbawm sebelumnya beranggapan bahwa

di lingkungan tersebutlah para bandit dapat beroperasi. Lebih jauh, para ‘pemilih’ tidak dapat diklasifikasikan sebagai ‘petani tradisional’ karena mereka benar-benar terlibat di dalam pertanian kapitalis dan bersekutu dengan kelas pekerja pedesaan. Lebih penting lagi, Australia di akhir abad ke-19 merupakan daerah kapitalis yang sudah maju. Seluruh argumen O’Malley menolak argumen-argumen Hobsbawm tentang petani, kapitalisme dan perbanditan (O’Malley, 1979: 494-499).

Melihat kembali proposisi Hobsbawm, ia membedakan perbanditan sosial dari dua jenis kejahatan pedesaan: aktivitas geng yang berasal dari dunia bawah profesional (perampok biasa) dan komunitas yang menganggap bahwa perampokan adalah bagian dari gaya hidup normal (Hobsbawm, 1969: 13-14). Bagaimana perbanditan sosial di Jawa berlangsung? Untuk memahaminya, pertama kali kita perlu melihat siapa yang disebut bandit di pedesaan Jawa.

Kondisi Umum Perbanditan di Jawa

Sayangnya, bandit tipe ideal dan romantis ala Hobsbawm hampir tidak ada di pedesaan Jawa. Dua novel dari akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 oleh seorang penulis Belanda di Hindia Belanda

yang berpengetahuan luas dapat memberi kita gambaran tentang perbanditan di Jawa. Isaac Groneman dan P.C.C. Hansen Jr. atau nama samarannya Boeka dengan novel *Een Kètjoegeschiedenis* dan *Pah Troeno* masing-masing, menyadari apa yang terjadi di pulau itu. Groneman berbicara tentang kelompok kècu atau geng bandit yang ada di mana-mana dan dianggap oleh otoritas Belanda sebagai *roverbende*, *bendewezen*, *roverij* atau *roofpartij* untuk menunjukkan kelompok-kelompok kriminal tersebut. Kelompok kècu adalah kelompok-kelompok yang biasanya terdiri dari sepuluh orang atau lebih. Ada beberapa nama lain untuk mengidentifikasi bandit ini: *koyok*, *kampak*, atau *rampok*. Ada juga bajingan, pencuri kecil (dalam istilah kontemporer bahasa Indonesia, kita mungkin menyebut mereka ‘penjahat kelas teri’), begal dan pencoleng. Groneman sangat prihatin dengan situasi yang berlaku saat itu yang memburuk karena kontrol Belanda yang luas Belanda atas masyarakat. Kontrol luas disalahkan karena menyebabkan eksploitasi kejam penduduk pribumi oleh orang Eropa dan Tionghoa. Eksploitasi tersebut menyebabkan peningkatan kelakuan buruk, perbanditan, pemberontakan dan kekerasan.

Beberapa bagian dari Jawa benar-benar terkenal karena para ‘pelarian’ tersebut. Pantai Utara Jawa, Banyumas, Kediri-Madiun (bagian tengah Jawa Timur) dan Batavia Raya hanya sebagian kecil yang dapat disebutkan. Pada tahun 1919 dan 1920 ada total 170 ‘*rampokpartijen*’ (kelompok perampok) yang dilaporkan dari distrik Meester Cornelis saja (Cribb, 1991: 18-19). Kita dapat mengikuti gagasan bahwa kondisi kehilangan tanah yang semakin umum dan kehancuran kaum tani di awal abad ke-20 bersama dengan berbagai perlawanan adalah beberapa faktor penyebab di balik perbanditan tersebut. Boeka mengakui bahwa ada tingkat tinggi ketidakamanan di Jawa yang menyebabkan keadaan yang tidak menguntungkan bagi moralitas penduduk dan menyebabkan situasi yang memalukan (Boeka, 1901: 38-43, 48, 86, 172, 310, 335 dan 338). C. Amand, seorang penanam tembakau, melaporkan bahwa pencurian ternak, pemerasan, penyelundupan opium, kekerasan, dan terutama intimidasi adalah fenomena sehari-hari. Lapornya mungkin menawarkan kita beberapa keingintahuan tentang dunia pedesaan di Jawa. Selain itu, tidak mengherankan bagi kita untuk mengetahui bahwa jaringan luas kejahatan pedesaan

membangunan kerangka pedesaan di Jawa sebagaimana Amand menyatakan: “lebih banyak pencuri hidup di desa, semakin besar keuntungan kepala desa” (Schulte Nordholt, 1991: 39 dan 82). Jika kita mungkin berpikir bahwa tidak mungkin bagi masyarakat Muslim untuk memiliki kelakuan buruk dan pelanggaran ringan dalam kehidupan sehari-hari mereka karena mereka adalah Muslim yang saleh, maka itu pasti menyesatkan. Carel Poensen, seorang misionaris Belanda yang menghabiskan tiga puluh tahun waktunya di Jawa menyarankan bahwa orang-orang Jawa telah menjadi Muslim selama berabad-abad, sebagian besar dari mereka (‘bangsa abangan’) tidak pernah berdoa. Muslim yang saleh telah (atau setidaknya dulunya) menjadi minoritas dan mereka telah menjauhkan diri dari sebagian besar masyarakat (Poensen, 1886: 163). Dari karya tersebut, kita dapat mempelajari lebih lanjut bahwa selama Poensen berada di Jawa setidaknya ada dua pembagian besar dalam masyarakat Jawa, yaitu ‘bangsa putihan’ dan ‘bangsa abangan’. Kelompok pertama membentuk sejumlah kecil orang-orang yang dapat dianggap saleh atau orang-orang Muslim ortodoks. Yang lain

membentuk mayoritas yang tidak berbagi cara hidup religius (Poensen, 1886: 7).

Perbanditan dan Protes Sosial

Kembali ke perbanditan, tampaknya bahwa perbanditan itu lazim terjadi di Jawa karena adanya banyak protes sosial dari para petani. Perbanditan bahkan telah diidentifikasi sebagai bentuk sederhana dari pemberontakan karena pihak yang berwenang kesulitan untuk menanganinya (Blok, 2001: 29). Dalam protes petani, peran pemimpin informal tidak dapat diabaikan. Para pemimpin agama, seperti kiai di pesantren atau guru agama sering diasumsikan sebagai pemegang kepemimpinan politik. Mereka secara luas diyakini memiliki atribut mistis dan kemampuan magis yang membuat mereka menikmati kekuatan karismatik dan posisi sosial yang tinggi di masyarakat. Kebanyakan bandit yang sebelumnya adalah petani sebelum menjadi perampok biasanya belajar berguru 'ilmu' (secara harfiah pengetahuan, namun itu dapat berarti ilmu gaib atau seni bela diri) di pesantren atau lembaga keagamaan lainnya tidak hanya untuk ilmu agama, tapi jelas juga bagi ilmu kekebalan. Misalnya, kiai di Banten tidak hanya mengajarkan pembelajaran agama Islam, tetapi juga memberi

latihan seni bela diri sebagai salah satu pelajarannya. Murid yang lebih berbakat dalam berlatih seni bela diri dikenal akhirnya akan dikenal sebagai jawara (Tihami, 1992: 99-100). Kiai biasanya menjadi pemimpin dari orang-orang yang tidak disukai Belanda dan gerakan modernis Islam; karena ia memimpin mereka dalam arah yang dianggap sempit dan konservatif (Williams, 1990: 57-58). Kita harus ingat bahwa dalam perjalanan beberapa dekade, di Banten, ada intensifikasi fanatisme di kalangan pesantren dan sikap bermusuhan dan agresif yang tertanam ke dalam para santri (murid di pesantren) terhadap orang asing dan priyayi (Kartodirdjo, 1966: 154-157). Namun, hal itu tidak secara otomatis mengubah orang asing dan para bangsawan ke dalam korban kejahatan. Kebanyakan korban kejahatan justru adalah para petani. Seperti yang Blok telah sampaikan, bandit biasanya hidup dekat dengan korban-korban mereka. Bahkan, beberapa dari mereka tinggal di desa yang sama dan beberapa orang lain yang bahkan adalah tetangga dekat (Blok, 2001: 33). Bandit mengarahkan tindakan mereka terhadap properti dan orang-orang. Bentuk-bentuk kekerasan begitu melembaga dan bahkan sangat umum dalam kehidupan sehari-hari.

Bahkan jika bandit menyasar orang kaya, mereka tidak memberikan jarahan mereka kepada orang miskin. Salah satu tokoh penjahat paling legendaris di masa kolonial di Jawa, Si Pitung, yang beroperasi di Batavia dan yang telah diyakini sebagai Robin Hood Indonesia dan telah digambarkan secara romantis sebagai pahlawan dalam perjuangan melawan koalisi korup antara bangsawan lokal dan pemerintahan Belanda di banyak film, sebenarnya tidak lebih dari seorang perampok biasa, yaitu seorang penjahat. Setelah kematiannya, ia sebenarnya menjadi lebih terkenal sebagai sebuah cerita, balada, dan bagian dari pertunjukan lenong (permainan tradisional yang populer di Jakarta). Namun, tidak ada bukti yang telah ditemukan bahwa Pitung membagikan jarahannya kepada orang miskin (Van Till, 1996: 461-482). Ternyata, bandit sosial ala Hobsbawm yang romantis sebenarnya jauh dari kenyataan.

Perbanditan dan Usaha-usaha Pemberantasannya

Perbanditan sangat sulit untuk dibasmi. Meskipun setelah orang-orang Eropa datang, praktik pengayauan, amok dan kanibalisme berhasil diberantas, perbanditan agak rumit untuk dihilangkan. Otoritas kolonial bahkan harus

mengirim Marsosé² ke Hindia Belanda untuk memerangi bandit yang merajalela di periode ketika perdamaian masih ada antara tahun 1920 dan 1940 (Van Wulfften Palthe (b), 1949: 27). Hal tersebut nampaknya merupakan situasi yang sangat luar biasa karena pada masa kolonial di Jawa memecahkan kejahatan sebagian besar adalah tanggung jawab aristokrasi atau dengan kata lain, bupati, wedana, dan asisten wedana yang membentuk tingkat atas struktur administrasi aristokrasi yang dibuat oleh pemerintahan Belanda. Dalam hal ini, asisten wedanalah yang merupakan pejabat aristokrat yang paling bertanggung jawab untuk melakukan investigasi kriminal di wilayahnya (Rush, 1990: 114-115). Meskipun kita tahu bahwa pemerintah Belanda punya semacam kelompok polisi pada masa kolonial Jawa di bawah divisi utama *Algemeene Politie* (Polisi Umum) yang terdiri dari *Stadspolitie* (Polisi Kota), *Veldpolitie* (Polisi Lapangan), *Gewestelijke Recherche* dan *Bestuurspolitie*, namun jumlah mereka tidaklah mencukupi (Sierevelt, 1932: 387) sehingga pasukan keamanan setempat harus diberdayakan.

² Sebuah unit militer dengan tugas polisi yang bertugas di antara penduduk sipil yang dibentuk pada tahun 1890 yang pertama kali difungsikan pada Perang Aceh (1837-1908).

Kita sekarang beralih ke *jagabaya*. *Jagabaya* tampil sebagai polisi di desa-desa. Mereka secara resmi adalah asisten kepala polisi. Tugas mereka adalah untuk mencegah pelanggaran, dan mereka aktif sehubungan dengan kejahatan nyata seperti pembunuhan, pencurian, pembakaran, perampokan, dan perkelahian antara warga desa (Onghokham, 1978: 72). Mereka bukanlah warga desa biasa karena kemampuan mereka dalam ilmu gaib dan bela diri. Profesi mereka adalah kejahatan dan mereka bisa menawarkan jasa mereka bagi siapa saja yang bisa membayar mereka. Sebagai polisi pedesaan, mereka bisa memanfaatkan properti komunal dan dibebaskan dari layanan kerja wajib rutin. Sebagai agen rahasia, mereka mungkin dibayar oleh penduduk desa atau bekerja secara individual untuk mata pencaharian mereka. Mereka memiliki hubungan ambigu dengan penduduk pedesaan; mereka ditakuti dan juga dikagumi. Beberapa menebar teror di daerah mereka, tetapi yang lain dipandang sebagai pembela hak-hak petani untuk perjuangan mereka melawan Belanda dan aristokrasi (Rush, 1990: 116).

Sejalan dengan keyakinan lama tradisi Jawa, menggunakan pencuri untuk menangkap pencuri,

jagabaya dipandang sebagai solusi yang memungkinkan dalam pemberantasan perbanditan. Otoritas kolonial melalui pemerintah daerah memanfaatkan perantara ini untuk menegakkan perdamaian lokal. *Jagabaya* bisa digunakan karena mereka memiliki rentang yang lebih luas dalam berhubungan dengan unsur-unsur di dalam masyarakat. Dunia bawah di daerah pedesaan (*alam peteng*) hampir tidak dikenal oleh warga biasa. Ini tidak berarti, bagaimanapun, bahwa dunia ini tidak mungkin ditembus. Ada fungsionaris desa tingkat rendah yang bertugas untuk menjaga desa dari penjahat. Fungsionaris ini yang disebut *kapetengan*, sering bekerja sama dengan *jagabaya*. Kadang-kadang *kapetengan* ini adalah *jagabaya* sendiri. Tidak ada pembagian yang tegas antara orang baik dan orang jahat. *Jagabaya* gemar berkumpul di sarang opium. Mereka juga mendukung perjudian dan prostitusi. Pertemuan dengan orang-orang dari *alam peteng* menciptakan sisi bermanfaat untuk *jagabaya*. Mereka menyadari apa yang terjadi di masyarakat yang penuh rahasia dan dengan demikian mereka dipekerjakan oleh pihak manapun yang punya kepentingan untuk menyusup ke *alam peteng*.

Dalam *alam peteng*, kelompok perampok mungkin dapat dibagi ke dalam tiga jenis utama: *maling krowodan*, *maling tengah* dan *maling ketut*. *Maling krowodan* atau pencuri biasa membentuk bagian terbesar dari kategori ini. Sebagian besar dari mereka adalah penjahat non-profesional. *Maling tengah* sering bertindak sendirian dan hampir tidak pernah berkeliaran ke tempat-tempat jauh atau dengan kata lain, mereka memiliki lingkup yang terbatas. *Maling ketut* atau lebih dikenal sebagai *kècu* sering beroperasi dalam geng dan berkelana di tempat yang jauh dari rumah mereka. Mereka berbahaya dan ditakuti (Quinn, 1975: 37). *Kècu* biasanya tahu satu sama lain jika mereka telah bekerja sama di masa lalu, tetapi jika mereka tidak bekerja sama itu tandanya mereka mungkin tidak mengakui satu sama lain. Mereka tidak bergabung dalam satu kelompok besar, tapi kadang-kadang mereka terhubung satu sama lain ketika mereka menyukai rencana masing-masing. Dalam beberapa kasus bandit menempatkan janur kuning di sekitar kepala mereka sebagai tanda pengakuan, atau sebagai gambar kebencian (Groneman, 1887: 194-195).

Meskipun kelompok perampok bisa begitu keras, mereka cenderung untuk menggunakan metode non-kekerasan dalam operasi mereka. Tindakan kekerasan muncul jika tidak ada cara lain untuk menghindarinya. Mereka lebih memilih untuk menggunakan beberapa jenis mantra dan varian lain dari magi-mistik untuk membuat tidur nyenyak pada korban (*aji sirep*). Beberapa mantra untuk membuat tidur diketahui keberadaannya, tetapi sebagian besar *primbon* memberi kesan bahwa *Begananda* adalah ilmu yang paling efektif. Pencuri yang berhati-hati juga berkomunikasi dengan roh, khususnya roh leluhur, roh wali dan roh-roh yang diyakini mengawasi hari-hari tertentu dalam seminggu. Para pemimpin biasanya diberkahi dengan kekuatan mistis di mana pengikut-pengikut mereka memiliki keyakinan yang kuat bahwa para pemimpin mereka benar-benar menguasai kemampuan magis. Mereka juga dilengkapi dengan jimat untuk menolak bala ,dan roh jahat yang diarahkan kepada mereka (Van Wulfften Palthe, 1949 (b): 27-28; Suhartono, 1995: 102 , dan Quinn, 1975: 47-48).

Ide tentang karisma dikenal di masyarakat Indonesia. Bukan hanya elit agama yang

diasumsikan memiliki kekuatan karismatik, tetapi juga para pemimpin dunia bawah. Hubungan pemimpin-pengikut di kelompok perampok mencerminkan hubungan guru-murid di kalangan dunia pesantren atau dunia tarekat yang memungkinkan para pemimpin untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kepala bandit biasanya memiliki jimat yang memberikan mereka kekebalan dan ilmu menghilang yang diperoleh melalui ziarah ke makam suci atau tempat-tempat suci, seperti gunung keramat (gunung suci), pohon-pohon besar dan tua atau batu-batu besar. Ziarah ke situs tersebut juga digunakan untuk menunjukkan waktu ketika perampokan mungkin dilakukan, atau juga metode untuk mengeksekusi pembobolan. Karena kharisma yang dimiliki oleh para pemimpin, para pengikut menjadi begitu setia dan dapat diandalkan bagi mereka. Seorang *benggol* (seorang pemimpin dari sebuah kelompok perampok) di pedesaan Jawa sering memimpin geng sampai ia sangat tua sehingga ia tidak dapat bertanggung jawab lagi atas kelompoknya atau sampai ia meninggal selama masa jabatannya.

Pemerintah kolonial berusaha untuk membasmi bandit dengan menangkap anggota-

anggota kelompok *kècu*. Misalnya, di bawah pemerintahan Sultan Hamengku Buwono V, tak lama setelah Perang Jawa dimulai, sekelompok perampok di bawah pemimpinnya, Gobang Kinosek ditangkap. Para anggota geng memiliki julukan yang sangat menakutkan, seperti Kandang Jinongkeng, Dadoeng Sineret dan Pentung Pinanggul. Pentung Pinanggul misalnya, berarti bantalan gada di bahu, sementara Gobang Kinosek menunjukkan belati besar dan tajam siap untuk digunakan. Nama-nama menakutkan tersebut ditujukan untuk menakut-nakuti korban-korban mereka, sebagian besar petani yang bisa dengan mudah terpengaruh. Namun, untuk pemerintah, bukanlah nama mereka yang menyebabkan banyak masalah, tapi kejahatan-kejahatan mereka. Gobang Kinosek dan gengnya dikejar-kejar dan dibunuh dan kepala mereka dipisahkan dari tubuh mereka untuk menunjukkan kepada bandit lain dan juga penjahat-penjahat yang potensial bahwa hukuman keras dapat dilberlakukan kepada para penjahat berbahaya tersebut. Dalam beberapa cara, upaya pemerintah dihadapkan dengan situasi yang tidak terduga. Para penduduk akhirnya mengagumi penjahat-penjahat ini dengan mengunjungi kuburan mereka dan

menghormati mereka, terutama selama bulan *Ruwah* (*Sha'aban*, bulan ke-8 dalam kalender Islam) (Groneman, 1887: 192-193).

Kasus Gobang Kinosek, di mana hukuman kejam diberlakukan kepadanya, hanyalah beberapa pengecualian. Kondisi yang berlaku memberi kita kesan bahwa pemerintah tidak dapat mengatasi kejahatan di pedesaan Jawa, terutama di daerah tanpa penduduk Eropa. Kebanyakan pencuri bebas kembali untuk beroperasi meskipun mereka ditahan sebelumnya. Upaya mereka tak membuahkan hasil dan akibatnya, sejumlah pemimpin bandit memberikan perlindungan kepada penduduk desa dan mereka juga menawarkan layanan keamanan ke desa-desa tertentu agar desa tersebut tidak diganggu, atau dengan kata lain: tidak akan dirampok (Boeka, 1901: 39 dan 88).

Penutup

Dalam praktiknya, bandit biasa dan jenis-jenis bandit lainnya tidak mudah dipisahkan dengan jelas. Pada halaman-halaman berikut kita akan mendiskusikan jago, jawara dan preman yang juga telah dianggap sebagai bentuk-bentuk protes sosial dan pemberontakan. Intinya saya ingin membuat kesan bahwa bandit di masa kolonial Jawa memiliki

aspek khas yang menghubungkannya dengan kelompok-kelompok lainnya yang akan dibahas, yaitu aspek kekerasan mereka.

Bab IV

Jago: Master Dunia Bawah

Pendahuluan

Jago tidak diragukan lagi adalah *strongmen* yang paling terkenal dan dibahas dalam banyak literatur. Sejumlah besar literatur telah menunjukkan tentang jago apakah penulis literatur-literatur tersebut tertarik akan kekerasan, gerakan protes, pialang kekuasaan atau hanya penjahat di masa kolonial Jawa, Hindia Belanda atau Indonesia. Sementara istilah tersebut mungkin menawarkan persepsi umum bagi para ahli yang bekerja pada subjek mulai dari sejarah, antropologi atau sosiologi, istilah tersebut juga dapat membangkitkan minat para ahli kriminologi, politik dan studi kawasan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya istilah tersebut mungkin samar-samar, tetapi juga bahwa istilah tersebut dapat disalahgunakan. Memang benar bahwa minat utama saya adalah untuk melacak akar sejarah *strongmen* di Indonesia dan tindak kekerasan yang diwujudkan oleh mereka. Namun, karena istilah jago telah banyak digunakan dan juga disalahgunakan, saya juga prihatin dengan bagaimana istilah ini telah tertanam dan dianggap

dalam literatur yang berhubungan dengan mata pelajaran yang telah saya sebutkan.

Jago secara harfiah berarti ayam jantan atau ayam adu. Penggunaan kata 'jago' tidak selalu mengacu pada konotasi negatif. Pada periode kontemporer ini, seseorang, misalnya, dapat menunjukkan seorang ahli matematika sebagai seorang 'jago matematika', meskipun jelas untuk mengidentifikasi preman terkenal yang melakukan kejahatan, seseorang mungkin menyebutnya 'jagoan' kepada orang itu. Meskipun jago sangat dikenal di masa kolonial Jawa, hampir setiap daerah memiliki kata sendiri untuk mengidentifikasi kelompok tersebut. Brengseng di Banyumas; warok di Ponorogo; bromocorah di Kediri; bangkrengan atau gento di Tegal; lenggaong di Pemalang;;jawara di Banten, Batavia dan Jawa Barat; atau pendekar sebagai nama paling populer adalah sebutan lain bagi jago. Anton Lucas menyebutkan:

“Seorang lenggaong tidak selalu mencuri dengan cara seorang pencuri biasa. Seorang lenggaong adalah orang yang memiliki kekuatan fisik dan pengetahuan spiritual yang mendalam. Dibutuhkan waktu yang lama untuk menjadi lenggaong, belajar seni

bela diri (silat) dan memperoleh pengetahuan tentang hal-hal dalam (ilmu-ilmu dalam,). Jika seseorang dianggap lenggaong, mata pencahariannya tidak datang dari mencuri, tapi dari orang lain yang membutuhkan keamanan perlindungan yang dapat ia berikan [...] Pada masa kolonial lenggaong pada umumnya disegani oleh orang-orang. Tindakan mereka tidak mengganggu rakyat. Justru pemerintahan kolonial dan para tuan tanahlah yang merasa terganggu” (Lucas, 1981: 37).

Akar sejarah jago terbentang pada masa prakolonial, pada masa perang kerajaan dan pada masa kekerasan dalam sejarah Jawa (Onghokham, 1984: 335-336). Namun, peran baru mereka muncul dan memuncak selama periode kolonial.

Kelompok-kelompok yang Mirip Jago

Jago, bagaimanapun, sering disalahpahami oleh para ahli. Jago hanya ada di Jawa Tengah dan Timur. Kelompok serupa di daerah lain memang ada. Meskipun demikian, mereka memiliki nama tertentu. Menurut Smail, Cribb, dan Van Till, di wilayah Jabodetabek, istilah jawara yang lebih dikenal, bukan jago (Smail, 1964: 88; Cribb, 1991:

18-19, dan Van Till, 1996: 462). Selain itu, jago lebih dari sekedar penjahat pedesaan sederhana (Smail, 1966: 88), karena mereka juga dikenal untuk perannya sebagai pialang kekuasaan. Istilah jago ini juga sering terdistorsi dengan jagoan (Schulthe Nordholt (Nico), 2002: 53-54). Orang-orang Indonesia terbiasa menyebut *strongmen* masa kini sebagai jagoan, bukan jago. Jago sebenarnya adalah sebuah kata sifat atau kata benda untuk mengidentifikasi seseorang yang tangguh (dalam pertempuran) atau pintar (dalam ilmu), misalnya. Kelompok atau individu yang bertindak seperti jago secara umum disebut sebagai jagoan. Istilah ini memiliki konotasi baik positif dan negatif. Meskipun tampaknya tidak penting, bagaimanapun juga mengidentifikasi kelompok tertentu dengan nama lain dapat menyesatkan dan dapat mengarah ke kesalahpahaman. Oleh karena itu, apa yang saya bahas di sini adalah kelompok jago yang pernah berkeliaran dan menetap di masa kolonial Jawa.

Di Jawa Timur jago menemukan zona nyaman (*comfort zone*) mereka. Mereka bahkan dapat bertindak sebagai pialang kekuasaan. Mereka juga dikenal sebagai palang, kebyan, weri atau blater. Mereka biasanya pemimpin kelompok sebaya (*peer*

group). Kadangkadangkang, palang bisa melampaui karisma seorang kepala desa. Karisma ini juga diperluas bagi penduduk pada umumnya (Onghokham, 1978: 74). Palang, bagaimanapun, tidak menikmati kekuasaan mereka untuk waktu yang lama. Ketika pemerintah kolonial menghentikan *Cultuurstelsel* pada tahun 1870, pihak berwenang menghapus palang dari fungsi sebelumnya sebagai agen untuk kerja rodi. Fungsinya digantikan oleh weri yang dipekerjakan oleh pemerintah Belanda untuk memberikan informasi kepada mereka. Oleh karena itu weri bertindak sebagai mata-mata dalam memberikan informasi tentang apa yang terjadi di desa-desa. Untuk penduduk desa, weri disebut blater dan kelompok ini berjumlah sekitar 4.000 hingga 5.000 orang pada awal abad ke-20 hanya di Residensi Madiun saja (Onghokham, 1978: 74-75). Namun, bagi otoritas Belanda kepemimpinan non-birokrasi di atas tingkat desa dianggap tidak perlu karena palang dianggap sebagai pengeluaran yang tidak perlu atau juga karena palang merupakan sumber kemungkinan perlawanan masyarakat lokal terhadap reformasi yang diperlukan. Bupati yang banyak menggunakan perantara seperti palang dicurigai

sebagai orang licik yang mengekstraksi upeti berlebihan dari desa mereka atau lebih buruk lagi, mencoba untuk membangun basis kekuatan anti-Belanda. Belanda tidak pernah menempatkan palang pada daftar resmi fungsionaris Hindia Belanda, dan mereka bahkan tidak diakui secara formal oleh pemerintah kolonial setelah *Cultuurstelsel* berakhir. Namun, para bupati memerlukan perantara lebih dari sebelumnya sebagai saluran komunikasi ke tingkatan-tingkatan sosial yang utama di atasnya (Onghokham, 1978: 132).

Jago dan Kriminalitas

Jago dalam bentuk yang paling sederhana juga bisa saja adalah seorang penjahat. Kelompok perampok biasanya dipimpin oleh seorang pemimpin yang kuat dan sakti. Pemimpin ini membentuk jaringan di dunia bawah dengan pemimpin lain dari kelompok yang sama. Jaringan-jaringan serta kelompok yang ada bersifat relatif longgar dalam struktur dengan individu-individu yang terpusat pada pemimpin. Para pengikut hampir tidak dianggap jago karena hanya ada satu 'jagoan' di sebuah kelompok meskipun jaringan jago yang terstruktur bersifat umum. Orang-orang tersebut

atau para anak buah (bawahan) bisa pindah ke geng lain dan mengambil sumpah untuk setia dan dapat diandalkan untuk pemimpin baru mereka jika geng lama dibubarkan atau pemimpinnya ditangkap atau jika mereka yakin bahwa kelompok baru dapat memberikan mereka kesempatan yang lebih besar. Patronase demikian sangat jelas dalam kelompok-kelompok ini. Para pemimpin menjaga posisinya dengan mengeluarkan imbalan materi kepada anggota-anggota yang terkemuka dalam kelompoknya masing-masing. Koneksi pribadi antara anak buah dan pemimpin bisa saja ada dan ditandai dengan ketergantungan pada bantuan dari pemimpin untuk anak buah.

Seperti bandit terkenal Si Pitung di Batavia, jago bukanlah penjahat yang budiman. Jago, ketika mereka melakukan kejahatan dengan kelompok-kelompoknya, tidak merampok dari orang-orang kaya dan mendistribusikan jarahannya kepada orang-orang miskin. Petani pada umumnya adalah mangsa yang mudah bagi kelompok-kelompok ini. Pencurian sapi yang cukup umum di Pasuruan misalnya. Pada tahun 1909 ada 1.382 pencurian sapi, sedangkan jumlah tersebut turun menjadi 778 pada tahun 1914, 189 pada tahun 1919 dan hanya

63 pada tahun 1924 (Suhartono, 1995: 148). Jumlah tersebut terus menurun untuk satu alasan utama. Perkebunan tebu diperkenalkan oleh tuan tanah Tionghoa yang menyewa tanah dari berbagai bupati sejak dekade terakhir dari abad ke-18. Salah satunya adalah pengusaha Tionghoa Han Kik Ko (1766-1813), putra kelima dari Kapten Han Bwee Kong di mana perkebunannya di sekitar tahun 1808 mencakup 12 desa dan 2.538 orang (Salmon, 1991: 63). Selama masa jayanya, sejumlah besar orang mendapatkan uang dengan menyewakan gerobak sapi mereka ke perkebunan sebagai sarana kehidupan mereka. Banyaknya ternak menarik kelompok perampok untuk beroperasi di Pasuruan. Namun, Perkembangan transportasi pada awal abad ke-20 yang berarti adalah sebuah kemajuan pada akhirnya mengurangi nilai penting gerobak sapi. Akibatnya, pencurian sapi menjadi jauh berkurang (Suhartono, 1995: 147-148).

Dalam bentuk lain dari kejahatan, jago mungkin melakukan berbagai bentuk pemerasan. Meskipun cukup longgar dalam struktur, kelompok jago memiliki wilayah mereka sendiri dengan hirarki pemimpin dan sponsor, dan ditandai oleh spesialisasi fungsi yang berbeda. Pertemuan di pusat-

pusat hiburan, seperti sarang opium, tempat prostitusi atau hanya warung berfungsi sebagai sarana mendiskusikan rencana mereka. Mereka mengatur operasi pemerasan di sana. Jago menyadari bahwa kekuasaan kolonial tidak mampu menembus ke tingkat terendah pemerintahan, yaitu desa. Daendels menciptakan pemerintahan yang sentralistik. Semua urusan pemerintahan disusun dari Batavia. Pemerintah kolonial bercermin pada mekanisme administratif model Barat yang menempatkan sultan dan keluarga mereka di bawah pemerintah kolonial Belanda dan dikonversi menjadi birokrat. Tujuan Daendels adalah untuk menjalankan pemerintahan secara langsung sehingga ia bisa memerintah orang-orang tanpa penguasa lokal sebagai perantara. Namun demikian, setelah era Daendels atau lebih tepatnya setelah perang Jawa, pemerintah kolonial Belanda tampaknya melihat kembali ke masyarakat pribumi untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan di wilayah administratif yang lebih rendah di mana sistem administrasi pribumi sangat mengandalkan hubungan pribadi. Desa menjadi unit administratif terendah yang dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibayar dengan sebidang tanah desa. Pada masa

tersebut, yang disebut pemerintahan tidak langsung, jago menaawarkan “perlindungan” ke desa-desa tertentu. Akibatnya, desa-desa tersebut aman dari pencurian sapi atau perampokan biasa. Namun, “perlindungan” tersebut sama sekali tidak gratis, dan ini menunjukkan bentuk yang paling utama dari pemerasan yang dilakukan oleh jago.

Sebagai pemeras, jago juga melakukan kejahatan dengan cara yang lebih lembut dan elegan. Mereka tidak akan melakukan kejahatan apapun di sebuah desa tertentu dan bahkan akan melindungi desa tersebut dari perampokan. Penawaran ini sekali lagi tidak gratis. Sebagai gantinya, mereka menerima pembebasan pajak. Dalam hal ini, mereka dikagumi oleh orang-orang (Schulte Nordholt, 1991: 82). Tidak mengherankan, karena mereka tahu banyak tentang unsur-unsur yang rentan di desa-desa. Sesejumlah jago bahkan dapat membuat dirinya menjadi kepala desa. Akibatnya, desa-desa tersebut dikuasai oleh generasi baru para jago (Schulte Nordholt, 1991: 84).

Peran Lain Jago

Jago mungkin juga bertindak sebagai pialang kekuasaan atau perantara karena adanya tuntutan tersebut di semua lapisan masyarakat. Perantara

muncul di antara gambaran kebudayaan ideal dan realitas politik yang mengatur masyarakat yang menjembatani kesenjangan ideologi. Ide-ide aristokrasi yang ideal dan ide-ide semua pemegang kekuasaan formal di Jawa adalah salah satu pusat simbolis, pelindung, pasif dan menjauhkan diri dari urusan sehari-hari. Singkatnya, ideologi kolonial membuat para bangsawan sebagai kelas parasit yang tidak terlalu berbahaya. Sama seperti tuntutan pemerintah Belanda dan aristokrasi yang tidak dapat dipenuhi tanpa perantara aktif, kaum tani juga melihat kebutuhan untuk kepemimpinan yang lebih aktif. Hal ini ditemukan dalam diri para jago tersebut. Jarak yang relatif jauh dari fokus formal kekuasaan memberi perantara kebutuhan kecil untuk karisma, dan lingkup yang lebih untuk tindakan langsung (Onghokham, 1984: 337). Perantara yang baik diilustrasikan dalam novel sejarah Isaac Groneman *Een Kètjoegeschiedenis*. Ia digambarkan tidak hanya, misalnya, lebih kaya daripada kepala desa, tetapi juga digambarkan sebagai lebih dari seorang pencuri biasa. Ia sepenuhnya menyadari apa yang ia lakukan karena ia dihormati oleh penduduk desa (Boeka, 1901: 27-29).

Ketika mereka bertindak sebagai broker, jago biasanya bertindak sebagai lawan penduduk, dan mereka berhasil dalam menerapkan rezim ketakutan di masa kolonial Jawa (Schulte Nordholt, 2002: 39-40). Bupati-bupati di Jawa harus mencapai kesepakatan dengan jago di wilayahnya. Akibatnya, jago dengan cara ini menjadi mata-mata para bupati di daerah mereka dan mereka tidak akan takut untuk menerima peran sebagai lengan yang kuat dari hukum (Schulte Nordholt, 1991: 78). Jago hampir selalu berguna sebagai mata-mata dan kolaborator dari bupati. Oleh karena itu, mereka berhasil bertahan di luar jangkauan pemerintah Eropa dan menciptakan basis kekuatan mereka sendiri dalam bayangan negara kolonial (Schulte Nordholt, 1991: 85).

Jago mungkin belajar silat pada guru tertentu. Hal ini juga mungkin bahwa mereka tahu beberapa patah kata bahasa Arab yang sederhana. Di Pekalongan, ada banyak kiai di daerah pedesaan yang sakti dan mampu mentransfer ilmu yang mencerminkan unsur-unsur magi-agama yang kuat di pedesaan-pedesaan dengan sifat Islam yang kuat (Lucas, 1981: 37-38). Lenggong di Pekalongan, Brebes dan Tegal sangat terlibat dalam revolusi

pedesaan pada bulan Oktober 1945. Mereka secara umum berkaitan dengan Islam (Lucas, 1981: 164). Di tempat lain, kelompok-kelompok milisi di daerah Batavia Raya juga menguasai keterampilan silat, termasuk ilmu kanuragan (kekebalan). Tidak seperti jago pada umum yang bukan dukun, para revolusioner ini juga bisa membuat jimat dengan jumlah yang sama dengan kesaktian. Gunung Jatibening adalah tempat favorit bagi kelompok-kelompok milisi di Jakarta untuk memperoleh kesaktian (Cribb, 1991: 20).

Kekuatan fisik individu, keberanian dan kecenderungan mistis adalah faktor utama dalam menjadi jago. Seseorang menjadi “diakui” sebagai jago setelah menyelesaikan periode magang. Periode ini terdiri di satu sisi untuk membantu jago memenuhi syarat dengan pencurian, dan di sisi lain—yang bahkan lebih penting—kandidat jago diberikan waktu magang di tempat seorang guru atau kiai yang mengajarkan ilmu. Untuk magang dengan seorang kiai adalah hal yang umum di kalangan pemuda. Juga sangat umum pada waktu itu bagi pemuda untuk melatih diri dalam metode pertempuran seperti silat. Namun, seseorang dapat memperoleh ilmu khusus yang diperlukan seorang

jago, misalnya ketika membangkitkan roh-roh jahat untuk membuat penghuni rumah tertidur, atau ilmu yang memungkinkan seseorang untuk menghilang tiba-tiba atau bahkan menjadi kebal. Pemagangan seorang calon jago diakhiri dengan periode abses dan kesendirian di hutan, diikuti oleh slametan. Magang itu belum tentu dihabiskan dengan seorang guru, karena para pemuda sering pindah dari satu guru yang lain (Schulte Nordholt, 1991: 80).

Pemerintahan kolonial prihatin dengan meningkatnya peran para jago tersebut. Batavia misalnya, mengirim Snouck Hurgronje ke Madiun untuk menyelidiki kasus yang melibatkan bupati Brotodiningrat. Snouck berpendapat bahwa beberapa pemimpin jago, di antaranya adalah juga para kiai dan dukun. Menurut Snouck seluruh jago terkemuka ini memiliki reputasi kebal dan mengajar orang lain cara untuk mencapai kekebalan. Meskipun akan sulit untuk membuktikan keterlibatan mereka dalam setiap desain subversif yang direncanakan Bupati Madiun, atau kejahatan apapun, Snouck menyarankan pemerintah untuk mengasingkan jago-jago yang paling menonjol. Menurut Snouck mereka memiliki reputasi kebal

bahkan kebal terhadap kekuasaan Belanda yang lebih tinggi dan terhadap peluru dan senjata tajam. Jika pemerintah Hindia Belanda tidak mengambil tindakan terhadap mereka, maka reputasi kebal mereka akan meningkat dan menyebabkan lebih banyak kerusuhan. Jadi untuk menunjukkan 'keunggulan moralnya', pemerintah harus bertindak melawan mereka (Onghokham, 1984: 328). Selain itu, jago sering juga memperoleh reputasinya dari rasa takut yang disebarkan pada penduduk setempat. Setelah ia telah membuktikan kekuasaannya, orang akan berpikir dua kali sebelum mendapatkan banyak hal di bawah kekuasaannya. Untuk para penguasa daerah yang resmi, jago adalah instrumen utama untuk memperkuat cengkeraman mereka di daerah mereka. Dengan demikian, selain hirarki resmi penguasa daerah, sebuah sirkuit informal yang sangat diperlukan juga beroperasi, di mana jago dioperasikan sebagai agen untuk otoritas yang lebih tinggi (Schulte Nordholt, 1991: 77).

Ketidakmampuan untuk memperkuat pemerintahan kolonial di tingkat lokal dan isolasi geografis di pedesaan menciptakan kevakuman administratif di mana kelompok-kelompok jago menempatkan dirinya. Intimidasi dan kekerasan

yang terpancar dari jaringan ini berubah terutama terhadap orang-orang yang untuk mencegah nasib yang lebih buruk, memutuskan lebih baik untuk membeli ancaman tersebut (Schulte Nordholt, 1991: 89). Selain itu, meskipun secara resmi jago dianggap telah memainkan hanya peran marjinal, dalam prakteknya mereka menduduki posisi sentral dalam kehidupan lokal karena mereka tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat, kesempatan yang mereka penuh dengan kekerasan. Kekerasan lokal adalah bagian dari tradisi yang hampir tak terputus di Jawa karena, sampai saat ini, tidak ada negara sentral yang telah memiliki kekuatan untuk mengendalikan masyarakat sepenuhnya (Schulte Nordholt, 1991: 89).

Penutup

Seorang jago ambisius akan mencoba untuk memenangi hati orang-orang yang lebih tinggi dalam hirarki dengan mengalahkan rekan-rekannya dalam pelayanan pelindungannya. Seorang pangeran mungkin menawarkan untuk memimpin ekspedisi sangat berbahaya, misalnya, atau kepala desa mungkin memulai layanan lainnya dan penghargaan daripada kepala kampung lain bahkan berani

meminta orang-orang mereka. Jelas peran jago sebagai juara para pengikutnya dan hamba tuannya dapat berkonflik, tetapi ketegangan itu berkurang oleh fakta bahwa pertimbangan utama dalam pandangan orang-orang Jawa adalah kedekatannya dengan sumber daya. Dari kekuasaan datanglah perlindungan, dan warga desa merasa seorang pemimpin yang “menyatu” dengan kekuatan di atas lebih berguna daripada orang yang menempatkan dirinya melawan kekuatan besar. Asumsi dasar mereka adalah pesimis: pemimpin tidak ada untuk memperbaiki nasib mereka, tetapi untuk mencegah, melalui koneksi dan memohon, nasib yang lebih buruk (Onghokham, 1978: 119).

Bab V

Jawara: Juara yang Ditakuti dan Dikagumi

Pendahuluan

Tubagus Chasan Sochib, tokoh yang pertama kali dibahas di awal diskusi kita, tidak diragukan lagi adalah jawara yang paling berpengaruh dan terkenal di Banten hingga saat ini. Sebagai orang tua (lahir tahun 1930 dan meninggal tahun 2011), orang mungkin menganggap bahwa ia adalah seorang veteran biasa. Ia memang seorang veteran di dunia jawara, kewirausahaan dan seorang veteran dalam arti bahwa ia berasal dari Generasi 45, generasi revolusioner yang berjuang di Revolusi Indonesia 1945-1949. Ratu Atut Chosiyah, mantan Gubernur Provinsi Banten yang di tahun 2014 dinyatakan bersalah di dalam persidangan karena kasus suap Pilkada Lebak adalah salah satu putrinya.

Mungkin yang paling berpengaruh dari empat kelompok *strongmen* yang dibahas di sini, dalam arti keterlibatan mereka dalam dunia sosial-politik, adalah jawara. Rezim Orde Baru memberi mereka kesempatan untuk memperluas diri di dunia

sosial-politik. Era Reformasi, yang sering ditandai dengan ketidakstabilan sosial dan ketidakamanan, bahkan telah menempatkan posisi kelompok ini secara tegas. Jawara telah lama bercokol di dalam masyarakat Banten. Seperti jago, akar sejarahnya dapat ditelusuri kembali ke zaman kolonial. Namun, tidak seperti jago, jawara bahkan semakin memperkuat posisi mereka dalam masyarakat hingga saat ini.

Kemunculan Jawara

Sepanjang sejarah, jawara di Banten menampilkan kontinuitas panjang dalam berbagai peran yang mereka mainkan, dari asal-usul mereka yang diwarnai mitos sebagai pengawal raja dan ulama, sebagai penghasut pemberontakan, hingga mobilisator petugas keamanan untuk partai politik dan elit penguasa. Seorang sejarawan terkemuka Indonesia, Sartono Kartodirdjo, berpendapat bahwa jawara yang sebagian besar terdiri dari orang-orang tanpa pekerjaan tetap sering terlibat dalam kegiatan kriminal (Kartodirdjo, 1966: 57-58). Sebuah laporan dari Residen Banten, Craemer, dalam *memorie van overgave*-nya (memori serah terima jabatan) dari tahun 1930-an, memberi tahu kita bahwa jawara pada awalnya berkembang dari *Orok Lanjang*, sebuah

organisasi pemuda di Menes. Organisasi ini kemudian berkembang, menyebar di luar Menes dan menjadi organisasi pengawal yang terkenal karena terlibat dalam pertempuran dan memicu masalah (ANRI, 1980: XXIII).³

Sementara Kartodirdjo menyebutkan empat kelompok yang melintasi hirarki desa, Michael Williams hanya menunjukkan tiga kelompok yang mendominasi kehidupan pedesaan pada khususnya. Mereka adalah ulama, tokoh lokal, dan jawara. Sementara Kartodirdjo percaya bahwa jawara terdiri dari orang-orang tanpa pekerjaan tetap yang sering terlibat dalam kegiatan kriminal, Williams dan Ota Atsushi memiliki pandangan yang lebih positif dari mereka. Williams menyatakan bahwa jawara adalah petani, biasanya pemuda lajang, dan yang pengaruh dan prestisenya sering jauh lebih besar dari kepala kampung. Di masa sebelumnya, istilah jawara hanya menunjukkan seseorang tanpa pekerjaan tetap. Secara bertahap, jawara diasumsikan dengan

³ Lebih jauh, Williams menyatakan bahwa organisasi tersebut pada mulanya adalah sebuah organisasi gotong royong yang memiliki administrasi sendiri, bendahara dan cabang-cabang local. Beberapa cabang memiliki pemimpin dan sekretaris sendiri ditambah dengan anggota yang membayar iuran bulanan. Lihat Williams, 1990: 281.

konotasi lain. Atsushi melihat jawara dengan cara yang hampir sama seperti Williams. Menurutnya, jawara bukan hanya *strogmen* lokal yang pengaruh dan prestisenya seringkali jauh lebih besar daripada para kepala desa di daerah terpencil di Banten selama periode kolonial, tetapi lebih jauh lagi, ia juga dikaitkan dengan fenomena bandit sosial di seluruh dunia di abad ke-19 dan abad ke-20, dan dengan jago. Jika kita memperhatikan pandangan orang Belanda, kita akan menemukan bahwa Residen Craemer percaya bahwa jawara memiliki reputasi buruk, seperti yang telah dijelaskan di atas. Secara umum, pandangan kolonial Belanda bersifat negatif seperti pandangan Kartodirdjo (Kartodirdjo, 1966: 57-58; Atsushi, 2006: 154; Williams, 1990: 45, ANRI, 1980: XXIII).

Relasi Jawara dan Masyarakat

Jawara adalah murid kiai. Kiai di Banten tidak hanya mengajarkan pelajaran agama Islam, tetapi juga memberikan seni bela diri sebagai salah satu pelajaran di pesantren. Murid yang lebih berbakat dalam berlatih seni bela diri dikenal sebagai jawara. Meskipun mereka meninggalkan pesantren setelah mereka lulus, mereka masih menganggap kiai sebagai guru mereka (Tihami, 1992: 99-100).

Mungkin itu sebabnya sejumlah besar jawara percaya bahwa mereka adalah khadam (pelayan) dari kiai.

Hubungan erat antara jawara dan ulama sangat penting sepanjang akhir abad ke-19, ketika pemberontakan melawan pemerintah kolonial Belanda meletus di seluruh Banten, dan terulang lagi selama perjuangan kemerdekaan. Baik jawara dan ulama merupakan tokoh sentral dalam kehidupan desa. Hubungan di antara mereka pernah berada dalam masa sulit karena jawara, untuk sebagian besar merepresentasikan tradisi pra-Islam yang kadang dianggap bertentangan dengan Islam (Wilson, 2003: 249). Di antara mereka, ada juga perantara yang dikenal sebagai ulama jawara. Istilah ini dapat diterapkan baik untuk jawara yang telah menetapkan diri sebagai guru agama, atau ulama yang telah menguasai seni bela diri. Dalam kedua kasus tokoh-tokoh seperti itu memainkan peran penting sebagai perantara budaya (Sunatra, 1997: 138).

Selain itu, baik jawara dan ulama jawara dalam jaringan pesantren yang luas juga berpengaruh dalam penyebaran seni bela diri. Mungkin seni bela diri di Banten saling terkait erat dengan kehidupan tarekat. Dalam beberapa kasus

jawara bergabung dengan kelompok tarekat sebagai bagian dari pencarian spiritual yang tulus. Namun demikian, lebih sering tarekat dan teknik yang diajarkan kepada mereka adalah cara untuk memperoleh berbagai macam pengetahuan esoterik yang dianggap penting untuk sukses sebagai jawara. Demikian pula, beberapa guru seni bela diri menerapkan ibadah komunal yang bersifat seperti tarekat (Van Bruinessen, 1995: 187-191).

Menurut Hudaeri, jawara memainkan peran terutama dalam aspek kepemimpinan, seperti menjadi jaro (lurah/kepala desa), jagakersa (penjaga keamanan desa/keamanan desa), guru seni bela diri, dan guru sihir (Hudaeri, 2002: 44). Tokoh-tokoh jaro yang pertama kali muncul pada masa pemerintahan kesultanan, masih ada hingga kini. Tentu saja, selama Orde Baru, tokoh-tokoh ini dikenal karena kepemimpinan mereka dalam memobilisasi penduduk desa setempat untuk memilih partai yang berkuasa dalam pemilihan umum. Sangat menarik untuk dicatat bahwa banyak jawara sering mengambil beberapa ayat dari Quran, dan dengan demikian mereka percaya bahwa kekuatan mereka awalnya berasal dari kiai dan bahwa kekuatan serta jawara itu sendiri dianggap

sebagai kekuatan dan jawara ‘putih’ (Hudaeri, 2002: 44- 53; Wilson, 2003: 245; Sunatra, 1997: 100-101). Meskipun demikian, saya berpendapat bahwa pandangan ini agak menyesatkan karena baik jawara ‘putih’ maupun jawara ‘hitam’ kemungkinan besar telah menggunakan ilmu hitam sampai hari ini.

Munculnya jawara bukanlah hasil dari penindasan dan kemiskinan belaka di Banten. Meskipun mereka mungkin telah bergabung dalam kerusuhan pangan secara spontan, atau mungkin telah melakukan tindak pidana, orang yang menghadapi kelaparan terlalu sibuk hanya untuk bertahan hidup sehingga tidak memiliki waktu untuk merencanakan penggulingan pemerintah atau merumuskan cetak biru untuk pembuatan alternatif sosial (Hobsbawm, 1965: 79). Munculnya jawara mendukung proposisi ini dan pernyataan bahwa potensi protes sosial yang penuh dengan kekerasan lebih tepat dikatakan sebagai suatu kondisi yang relatif daripada kekurangan yang absolut. Kelompok jawara yang dianggap bandit menderita kelaparan atau pemiskinan total; mereka mengalami penurunan yang signifikan dalam status sosial mereka dan kesejahteraan ekonomi.

Selain itu, hubungan mereka dengan penduduk pedesaan bersifat ambigu, seperti dapat dilihat dalam ambiguitas sosok jawara dalam etimologi rakyat (yang juga dapat dianggap sebagai singkatan) dari kata: jahat (jahat), wani (berani) , rampog (perampok) dan jago (juara), wani, (berani), dan ramah (ramah). Else Ensering mengklasifikasikan jawara menjadi dua kelompok: jawara-teri, mengacu pada pencuri kecil dan perampok, dan jawara-gedeh, yang berlatih pencak silat, menggunakan senjata, dan terobsesi dengan dunia mistis di bawah bimbingan kiai, yang akhirnya memuncak dalam memperoleh kekebalan (Ensering, 1995: 149).

Jawara dan Beragam Pemberontakan

Kombinasi komunisme dan Islam dalam pemberontakan tahun 1926 menandai keterlibatan jawara dalam sejarah pemberontakan Banten. Namun, keterlibatan mereka tentu dapat ditelusuri kembali ke pemberontakan 1888. Buku Kartodirdjo *The Peasants' Revolt* masih merupakan karya yang luar biasa, tidak hanya untuk penjelasannya tentang situasi sosial-ekonomi dan sosial-politik di Banten selama abad ke-19, tetapi juga pada pemberontakan itu sendiri. Namun demikian, Kartodirdjo

tampaknya mengabaikan keterlibatan jawara dengan terfokus terutama pada para pemimpin agama dan sentimen keagamaan dalam pemberontakan. Dari David Bourchier, kita mengetahui bahwa sentralisasi dan birokratisasi pemerintahan kolonial dan adat oleh Belanda memarjinalkan para jawara dan membuang mereka dari peran tradisional mereka dalam kehidupan desa (Bourchier, 1994: 181).⁴ Terdorong ke pinggiran, jawara menjadi lebih aktif terlibat dalam kegiatan kriminal. Keterlibatan jawara dalam pemberontakan 1888 serta dalam berbagai pemberontakan berarti bahwa mereka terus-menerus dikejar, dilecehkan dan dipenjarakan oleh pemerintah kolonial (Wilson, 2003: 250). Untuk Williams, dalam hampir semua kasus pemberontakan,⁵ kepemimpinan tidak hanya di tangan bangsawan dan para pemimpin agama tapi juga ditandai dengan keterlibatan jawara (Williams, 1990: 79).

Lama setelah pemberontakan 1888, pemberontakan 1926 lebih berlarut-larut dan lebih

⁴ Namun, Bourchier lebih memilih istilah jago daripada jawara untuk melihat aktivitas mereka di Banten.

⁵ Selama periode 1810-1870 tidak kurang dari Sembilan belas pemberontakan tercatat dalam sejarah Banten. Lihat Williams, 1990: 79.

populer di Banten daripada di daerah lain di Hindia Belanda, dengan pengecualian Sumatra Barat. Keterlibatan jawara dapat dilihat pada fakta bahwa banyak orang Banten berperan aktif dalam pemberontakan di Batavia. Mereka telah berhasil merekrut banyak jawara dan elemen-elemen jago elemen ke dalam PKI (Partai Komunis Indonesia). Selain itu, Williams membandingkan tingkat dan jangkauan organisasi pada tahun 1926 dengan pemberontakan 1888 dan berpendapat bahwa aspek-aspek pemberontakan 1926 jauh lebih luas. Baginya, jelas bahwa selain ulama, peran penting dalam pemberontakan ini dimainkan oleh jawara. Sampai batas tertentu, ia juga berpendapat bahwa para pemberontak tidak diragukan lagi dibutakan oleh keyakinan bahwa mereka kebal dalam mengobarkan jihad (perang suci) melawan Belanda. Sementara itu, untuk Michrob dan Chudari, kebencian ulama terhadap Belanda disebabkan tidak hanya oleh penderitaan orang Banten tetapi juga oleh kebijakan pemurtadan dan pembatasan yang diberlakukan oleh Belanda pada orang Banten untuk melakukan ibadah (Williams, 1990: 228-236 dan Michrob dan Chudari, 1993: 210). Saya berpendapat bahwa pandangan ini didasarkan pada persepsi umum

bahwa orang Banten adalah Muslim yang saleh. Pandangan ini, pada kenyataannya, sering dibesarkan ketika orang Banten berbicara tentang masyarakat Banten sendiri.

Jawara dan Orde Baru

Di Banten, ulama dan jawara dikooptasi ke dalam mesin politik Golkar. Pengakuan ulama oleh partai yang memerintah dimanifestasikan oleh pembentukan Satkar Ulama (Satuan Karya Ulama) pada tahun 1971, sementara jawara diorganisasi menjadi Satkar Pendekar (Satuan Karya Pendekar) pada tahun 1972. Dengan bergabung dengan negara dan menyesuaikan diri dengan suasana politik baru, mereka menciptakan posisi baru di mana mereka secara bertahap memperluas kekuasaan, status dan kekayaan mereka.

Hubungan patron-klien di Banten pada masa Orde Baru mungkin paling tepat diidentifikasi dalam hubungan antara negara dan jawara. Sepanjang sejarah, jawara selalu bekerja secara individu atau dalam rombongan kecil. Sementara ada jaringan informal dari individu-individu jawara, yang biasanya didasarkan pada kesetiaan dan loyalitas kepada ulama tertentu, hingga tahun 1970 awal belum pernah ada organisasi jawara yang

terstruktur secara formal. Satkar Pendekar, berganti nama menjadi Persatuan Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten Indonesia (PPPSBBI) didirikan sebagai forum untuk jawara dan perguruan seni bela diri di seluruh Banten serta Jakarta. Dari awal PPPSBBI mengidentifikasi hubungan “bangsa dan negara” dengan Golkar, dengan mana mereka memiliki hubungan dekat sejak pemilu 1977. Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh Tubagus Chasan Sochib yang sejak awal 1970-an adalah seorang anggota DPRD mewakili Fraksi Golkar, dan tentu saja tokoh terkemuka dalam komunitas jawara (Wilson, 1990: 257-258 dan Masaaki, 2004: 23).

Sochib lahir di Serang pada tahun 1930. Ia memiliki tiga saudara, Tubagus Basuni, Tubagus Syatibi dan Entus Sibli, dan seorang saudari, Ojah Faojah. Mereka semua anak-anak dari Tubagus Sochib dan Nyi Ratu Rofiah. Dia belajar di beberapa pesantren selama masa kecilnya. Dari seluruh pesantren tempatnya mengaji, Pesantren Pani'is di Jiput, Pandeglang adalah pesantren pertamanya. Ia dipercayakan kepada Kiai Cholil oleh orang tuanya. Selama tinggal di sana, ia menunjukkan keberanian dan kecerdasan, sikap yang akan menguntungkan karir masa depannya di

masyarakat. Pada masa Revolusi Kemerdekaan, Sochib pergi ke Pesantren Cadasari, di bawah bimbingan Kiai Icot. Tak lama setelah diterima di pesantren itu, ia bergabung dengan Hisbullah, sebuah kelompok perang gerilya, yang dikomandani oleh Kiai Abdullah dan Ayip Samin. Setelah masa revolusi berakhir, ia memulai kehidupan kerja yang lebih serius pada tahun 1967 (setelah beberapa tahun berurusan dengan sejumlah usaha kecil) dengan memberikan dukungan logistik kepada Kodam Siliwangi. Dua tahun kemudian ia mendirikan sebuah perusahaan konstruksi, PT Sinar Ciomas Raya, yang sering memenangkan tender pemerintah untuk jalan dan konstruksi proyek pasar. Keterlibatannya meluas hingga ke Perusahaan Negara Krakatau Steel serta dunia pariwisata dan real estate, sambil memegang posisi kunci dalam asosiasi, seperti Kamar Dagang dan PeIndustri (Kadin) pusat dan daerah dan Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) di mana ia menempatkan anak buahnya di komite eksekutif lokal (Masaaki, 2004: 23 dan Mansur, 2000: 79-82).

Posisi Sochib di PPPSBBI sebagai ketua adalah puncak mobilitas vertikalnya. Bahwa ia adalah seorang kepala kuli dan kemudian

memperoleh status lebih terhormat dengan menjadi seorang pengusaha menunjukkan mobilitas ini. Setelah ia mencapai puncak karirnya (vertikal), ia pindah secara horizontal dengan meningkatkan mobilitas sosialnya. Meskipun PPPSBBI bukan merupakan organisasi sayap Golkar, organisasi tersebut sangat penting dalam konteks politik Golkar. Golkar adalah elemen penting dan strategis bagi Sohib untuk memperluas mobilitas horizontalnya. Sebagai seorang pria dengan kekuatan—baik kekuatan sosial baik dan kekuasaan melalui kekerasan—ia memiliki lingkup yang luas untuk meningkatkan akses politiknya melalui Golkar. Untuk memperkuat dominasinya di Golkar, ia menempatkan jawara sebagai kader dalam organisasi bersimbol pohon beringin tersebut. Kader-kader tersebut menjabat beberapa posisi penting di tingkat kabupaten dan kota. Ternyata, mereka yang telah memiliki pengalaman sebagai pejabat setempat adalah orang-orang yang disukai olehnya. Namun, menurut Suhaedi, terlibat secara aktif dalam Golkar bukanlah pilihan dalam karirnya, meskipun pada kenyataannya ia adalah anggota dewan penasehat. Bagi Sohib, Golkar merupakan instrumen untuk memperluas dan

mengamankan bisnisnya, bukan alat untuk memperoleh kekuasaan politik (Suhaedi, 2006: 132). Oleh karena itu, melalui Kadin dan Gapensi, Sochib bisa mengendalikan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Banten, karena fakta bahwa izin dari Kadin dan Gapensi sangat diperlukan untuk pengadaan proyek-proyek pemerintah. Sochib memanfaatkan hal ini untuk mengkoordinasikan proyek-proyek di Banten dan koordinasi tersebut membawanya lebih banyak uang. Sisi lain dari situasi ini adalah bahwa hal itu menyebabkan jawara-jawara lain berada di bawah kekuasaannya untuk menjadi (sub) kontraktornya dan menerima bagian dari keuntungannya (Massaki, 2004: 23).

Namun demikian, saya berpendapat bahwa PPPSBBI adalah organisasi pertama yang menyebarkan kekuasaannya di konstelasi politik, dan bahwa konstelasi politik tersebut adalah kendaraan yang memperkenalkannya ke dunia bisnis yang lebih besar dari yang sebelumnya. Salah satu tujuan utama dari pembentukan PPPSBBI adalah untuk menyalurkan aspirasi jawara yang jauh dari kepentingan diri sendiri dan juga menjauhkan diri dari kriminalitas untuk menuju ke arah 'kegiatan-kegiatan konstruktif', yang pada

gilirannya akan memberikan kontribusi untuk program-program pembangunan sosial dan ekonomi Orde Baru. Meliputi lebih dari tujuh puluh perguruan dan kelompok debus, pada pertengahan 1990-an organisasi PPPSBBI mengklaim keanggotaan 170.000 orang. Dalam kata-kata Sochib, “di masa lalu jawara hanya berjuang untuk diri mereka sendiri, kelompok atau suku mereka, namun melalui PPPSBBI bersama-sama kita berjuang untuk bangsa dan negara”. Biasa dikenal sebagai ‘jawara pembangunan’, mereka bekerja untuk memastikan supremasi Golkar. Dengan mengambil keuntungan dari pengaruh lama jawara dalam kehidupan desa, Golkar, melalui Jenderal Ali Murtopo, memanfaatkan PPPSBBI untuk mengamankan dukungan untuk partai politik tersebut di Banten. Selain itu, sebagai ketua umum organisasi pendekar dan salah satu anggota komite eksekutif Satkar Ulama, Sochib dapat bertindak sebagai jembatan antara militer, birokrasi dan Golkar, serta dunia informal Banten (Wilson, 2003: 258).

Namun demikian, kegiatan-kegiatan Sochib tidak terbatas pada jawara dan dunia usaha. Sebagai salah satu pendiri dari dua perguruan tinggi swasta,

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Mansyur (Staisman), ia tetap menjadi ketua cabang Generasi 45 Serang. Ia telah menjadi kuat dalam semua aspek kehidupan Banten; sehingga orang luar yang ditunjuk sebagai birokrat tingkat atas akan mengandalkannya dan juga jaringannya sebagai jembatan ke dunia sosial-ekonomi-politik Banten (Masaaki, 2004: 23 dan Suhaedi, 2006: 135).

Tokoh jawara lain yang menonjol di masyarakat Banten adalah Maman Rizal. Seperti banyak jawara lainnya, setelah menguasai seni bela diri, ia pergi ke Jakarta untuk mendapatkan peluang yang lebih baik untuk mata pencahariannya. Pada tahun 1967 ia memulai karir politiknya dengan bergabung ke dalam Sekber Golkar dan kemudian, pada tahun 1970, bergabung dengan MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong), sebuah organisasi sayap Golkar. Setelah kembali ke Banten, ia menjadi anggota Golkar Pandeglang. Di Pandeglang ia diangkat sebagai Ketua Divisi Pemenangan Pemilu Dan Pengkaderan pada tahun 1987-1988. Jaringannya yang luas yang meliputi jawara lainnya dengan banyak pengikut, merupakan alasan dasar baginya untuk memegang beberapa

posisi penting di Golkar. Oleh karena itu, pengaruhnya dipandang sebagai faktor penting dalam karirnya di Golkar. Selain itu, ia juga menjabat sebagai bendahara MKGR dari tahun 1975 sampai 1987. Karir politiknya di Golkar berangsur-angsur membaik dengan pengangkatannya sebagai bendahara Golkar Serang pada tahun 1988-2000. Bagi Rizal, Golkar memiliki manfaat politik dan ekonomi yang membentuk dasar struktural untuk memperluas kekuasaannya. Sebagai pengusaha, ia telah terlibat dalam banyak proyek yang dibiayai pemerintah. Sementara itu, di dunia jawara, ia sekarang menjadi tokoh terkemuka dalam Kebudayaan Seni Tari dan Silat Indonesia Tjimande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir (Kesti TTKKDH). Organisasi ini dikenal luas di kalangan orang Banten, dan dengan demikian memfasilitasi penyebaran organisasi tersebut ke desa-desa. Akibatnya, Kesti TTKKDH berkontribusi pada kemenangan Golkar selama pemilu Orde Baru. Golkar, bagaimanapun, memberikan layanan yang menganugerahi anggota-anggotanya dengan posisi di DPRD sekaligus juga memberikan keuntungan besar pada mereka untuk membantu mereka menjadi pengusaha sukses. Seperti Sochib, aspek ekonomis

adalah alasan utama di balik aktivitas-aktivitasnya di Golkar (Suhaedi, 2006: 137-140).

Jawara-jawara Besar Banten

Di Cilegon kiai yang paling menonjol yang juga terkenal karena atribut jawara adalah K.H. Syafiq Latify, seorang kiai dari pesantren Al-Jauharotun Naqiyah. Reputasinya meluas hingga ke Serang, Pandeglang dan Lebak karena ia sering diundang untuk memberikan pengajian di luar kampung halamannya. Di berbagai daerah di Indonesia sudah umum ada tradisi di mana aspek-aspek keagamaan tertentu sangatlah esensial, seperti kondisi di mana pejabat pemerintah dan pengusaha berkunjung (sowan-meminta petunjuk/meminta petunjuk tentang berbagai hal) kepada para pemimpin agama. Kiai Syafiq Latify (kiai sekaligus jawara) adalah salah satu kiai yang paling sering dikunjungi di Cilegon, serta di Banten (Armuj, 2004: 109).

Latify adalah anggota Dewan Syuro PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Melalui pengaruhnya, ia dengan mudah merekomendasikan anaknya, H. Iskandar sebagai Ketua PKB Cilegon. Putranya yang lain, H. Ulfi diangkat sebagai manajer cabang Ramayana Department Store dengan memanfaatkan kekuasaannya. Banyak pengusaha pusat hiburan

memberikan upeti (japrem—jatah preman) kepadanya untuk keamanan bisnis mereka. Polisi setempat menyadari hal ini, tetapi karena pengaruhnya yang besar, polisi tampaknya enggan untuk berargument dengannya (Armuji, 2004: 109).

Jawara besar lainnya di Cilegon adalah Abah Mustofa. Ia memegang posisi sebagai kepala keamanan Kawasan Industri Cilegon. Pengaruhnya bahkan lebih jauh lagi. Ia juga mengontrol tempat-tempat strategis lainnya, mulai dari pusat hiburan sampai pantai wisata (Armuji, 2004: 110). Pihak berwenang sebenarnya menyadari kondisi tersebut. Alih-alih menghadapi jawara tersebut, pihak yang berwenang justru menggunakan layanan jawara untuk mengumpulkan retribusi.

Empat contoh jawara terkemuka dan kegiatan sosial politiknya menunjukkan kepada kita bahwa jawara untuk sebagian besar memegang peran penting dalam mewarnai aspek sosial-politik kehidupan di Banten. Selain itu, meskipun tergantung pada pemerintah pusat, pemerintah daerah relatif kuat dalam hal administrasi lokal karena mereka menawarkan pekerjaan dan menyalurkan dana pemerintah pusat. Hal tersebut memfasilitasi reproduksi pola patrimonial

pemerintahan di tingkat lokal, khususnya di Banten. Meskipun jawara sebagai elit lokal memiliki akses ke lembaga pemerintah pusat, mereka juga mengandalkan konstituensi lokal yang dimobilisasi melalui loyalitas etnis. Pemerintahan Soeharto menawarkan mereka kesempatan untuk memperluas dan mempertahankan jaringan regional dari hubungan patron-klien.

Menurut Macintyre, di antara komunitas-komunitas bisnis, Kadin terlihat terlalu dekat dengan pemerintah. Secara khusus, kepemimpinan Kadin terlihat terlalu dekat dengan Golkar secara tidak pantas. Beberapa tokoh Kadin terkemuka sering memberikan dukungan terbuka kepada Golkar dan pemerintah. Sejak awal Orde Baru, ahli-ahli strategi politik dan perencana keamanan dalam negara sering merasa cemas bahwa organisasi bisnis terkemuka tersebut tetap menjadi organisasi yang patuh kepada Golkar dan bahkan tidak mengembangkan kemampuan politik independen mereka sendiri (Macintyre, 1994: 376-377). Sangat menarik untuk dicatat bahwa Sochib telah terlibat dalam Kadin dan Golkar dan Rizal di Golkar juga. Keterlibatan mereka di partai yang berkuasa dibutuhkan untuk pengadaan kontrak pemerintah.

Sochib menggunakan hal ini untuk mengkoordinasikan kontrak dari pemerintah di wilayah Banten, sementara Rizal mendapat keuntungan untuk meningkatkan dominasi kekuasaannya. Namun, seperti yang dijelaskan sebelumnya, jawara juga terkenal karena keterlibatan mereka dalam kegiatan kriminal; sebagai pengusaha dengan minat yang luar biasa dalam memperoleh akses ke sumber daya yang dikendalikan oleh pemerintah daerah, mereka memanfaatkan status ganda mereka (sebagai jawara murni yang hanya mengandalkan kemampuan seni bela diri dan sebagai pengusaha) secara maksimal. Sebagai pengusaha, mereka memaksimalkan sumber daya keuangan mereka, dan sebagai jawara mereka menggunakan sumber daya kekuatan fisik mereka.

Hubungan patron-klien antara jawara dan negara secara akurat digambarkan di bawah ini:

“Meskipun operasi-operasi kami tidak resmi, sebenarnya kami mendapatkan kekuatan ini dari pihak berwenang (orang-orang di atas). Apa yang kami lakukan adalah tidak lebih dari tanggung jawab kami dengan imbalan materi yang cukup di dalamnya. Kami juga melaksanakan “pesanan khusus” yang

membutuhkan massa dan kekuatan memaksa terhadap pihak lain. Hubungan tersebut tidak diatur sembarangan, kecuali dengan pihak yang dapat menjamin manfaat yang besar. Kami menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang lebih tepat daripada menjadi perampok, pencuri atau pencopet” (Apang, seorang jawara yang wilayahnya berada di Pantai Anyer) (Armuji, 2004: 141).

Dalam gambaran yang lebih sederhana, jawara memiliki kontrol signifikan yang berpengaruh di tempat-tempat strategis, seperti pusat hiburan, hotel, restoran, pusat perbelanjaan, pasar atau pelabuhan. Salah satu indikasi penting dari kontrol ini adalah kebijakan pemerintah daerah dalam merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL). Kebijakan tersebut biasanya mengharuskan para pedagang untuk membayar retribusi untuk tempat baru mereka. Bagi jawara yang juga memiliki lapak-lapak kaki lima, mereka bebas dari semua retribusi karena posisi mereka sebagai jawara. Bahkan, mereka juga mampu merumuskan bisnis baru dengan menjadi perantara antara pedagang kaki lima dan pihak berwenang dalam berbagai negosiasi seperti dalam kasus relokasi Pasar Rau di Serang.

Hak istimewa yang tidak gratis ini dikompensasikan dengan menunjukkan sikap setia dan dapat diandalkan terhadap pihak-pihak yang berwenang kapan pun mereka membutuhkan bantuan dari jawara-jawara tersebut.

Hubungan antara pemerintah dan jawara tergantung pada saling pengertian, terutama di sektor ekonomi, meskipun selama pemilihan umum sektor politik kondisi 'saling pengertian' ini lebih menonjol. Dalam banyak aspek, jawara menjadi perisai dan pelindung bisnis para pengusaha. Sebagai gantinya, mereka "wajib" untuk memenuhi keinginan jawara dengan menyediakan japrem. Hal tersebut mengilustrasikan dengan baik apa yang kita kenal sebagai perdekkingan/perbekkingan (sistem dukungan).

"Keberadaan kami di tempat umum tidak lebih dari melakukan pengawasan untuk menjaga perdamaian dan ketertiban di masyarakat. Retribusi yang kami kumpulkan benar-benar diberikan kepada pihak berwenang. Peran kami hanya sebagai aparat keamanan, tidak lebih dari itu. Kami benar-benar menyadari betapa berat tugas yang kami laksanakan. Oleh karena itu sangatlah

normal jika kami menerima sejumlah kecil pendapatan dari retribusi yang kami kumpulkan tersebut sebagai mata pencaharian kami “(Apang) (Armuji, 2004: 138).

Muhit, jawara lain di kawasan niaga Cilegon juga menggarisbawahi pentingnya hal serupa:

“Kami tidak mengumpulkan retribusi sebanyak yang kami suka. Bahkan, itu adalah kata-kata dari pihak yang berwenang yang memberi kami keyakinan untuk mengatur dan bertanggung jawab dalam hal keamanan. Tugas kami hanya melakukan komitmen yang kami buat dengan pihak berwenang. Kami memberikan hasil dari kontribusi dan hanya mengambil sedikit sebagai upah kami “(Armuji, 2004: 138).

Apang dan Muhit, tidak seperti empat jawara menonjol yang saya sebutkan sebelumnya, tidak mudah untuk dibedakan dengan preman. Sebagai jawara-gedeh, empat tokoh sebelumnya tidak menyerupai preman. Meskipun sepak terjang mereka, terutama di Era Reformasi, telah digambarkan sebagai raja-raja kecil yang telah mengubah diri menjadi oligarki lokal yang kuat

dengan cara ilegal, mereka tidak pernah secara pribadi menggunakan kekuatan fisik mereka untuk menjalankan bisnis mereka. Mereka kebanyakan menggunakan perintah, ancaman dan intimidasi. Reputasi menakutkan dan kejam mereka diperoleh ketika mereka masih muda dan kuat dalam arti fisik. Lebih penting lagi, mereka telah menempatkan diri mereka sebagai pialang kekuasaan, menjembatani negara dan dunia bawah. Apang dan Muhit dan jawara-teri lainnya berada di bawah komando mereka. Jika Apang dan Muhit adalah 'penegak' di tingkat yang lebih rendah, seperti mengumpulkan uang dari supir angkot di wilayah mereka, keempat jawara-gedeh adalah 'penegaknya para penegak' tingkat bawah ini. Hal ini adalah bisnis mereka untuk berurusan dengan pihak berwenang dalam menentukan area mana menjadi milik siapa. Dalam pandangan saya, Apang dan Muhit mungkin cocok dengan kriteria tokoh yang seperti jawara yang telah digambarkan oleh Joshua Barker di dalam karyanya. Namun, tokoh-tokoh yang digambarkan Barker tersebut dalam pandangan saya tidak mencerminkan jawara Banten, tetapi lebih dekat dengan karakteristik preman. Jika benar-benar Barker bersikukuh bahwa mereka adalah jawara, versi

jawara ala Barker tidaklah sebanding dengan empat jawara-gedeh di Banten.⁶

Penutup: Jawara dan Konfigurasi Politik Lokal

Di satu sisi, Orde Baru menciptakan dasar yang kuat bagi jawara untuk masuk ke dalam hubungan yang saling menguntungkan dengan Golkar dan kekuatan militer. Kepemimpinan jawara yang didukung oleh struktur budaya Banten digunakan oleh rezim Orde Baru untuk memenangi politik di tingkat lokal. Di sisi lain, dengan dukungan dari Golkar, dan hubungan yang erat dengan angkatan bersenjata, jawara memperoleh manfaat berupa akses politik dan ekonomi sebagai dasar struktural untuk usaha mereka.

Jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 telah memberikan langkah-langkah penting dalam perkembangan dunia jawara. Masaaki telah menekankan pentingnya peran jawara di Pilkada Banten 2006. Dalam memenangkan Ratu Atut Chosiyah, kelompok jawara di bawah kepemimpinan puncak Tubagus Chasan Sohib menggunakan berbagai cara untuk menjadikan perempuan dengan pemikiran kuat dan kepercayaan

⁶ Barker menggambarkan preman biasa di Jawa Barat sebagai jawara. Lihat Barker, 1999: 119-122.

diri yang besar seperti jawara ini sebagai gubernur perempuan pertama Banten. Berbagai metode dilakukan mulai dari mempromosikan hasil dua polling yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia dan Lingkaran Survei Indonesia kepada publik; intervensi di dalam konvensi regional Golkar pada tanggal 2 Juli 2006, serta melakukan hal yang sama di dalam rapat kerja daerah khusus PDIP pada tanggal 5 April 2006 (hasilnya adalah bahwa Atut menjadi calon tunggal untuk kursi gubernur dari dua partai besar); memanfaatkan aspek materialisme pemilih (mulai dari jual-beli suara hingga mengeksekusi serangan serangan fajar/penyuapan saat fajar pada hari pemilihan); memberdayakan PPPSBBI dan Badan Pembina Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB); dan mengkooptasi intelektual muda, seperti aktivis dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) (Masaaki dan Hamid, 2008: 126-135). Strategi terakhir—pengkooptasian—benar-benar mencerminkan taktik Golkar yang digunakan selama rezim Soeharto dalam memperoleh kemenangan bagi mereka selama pemilihan umum.

Bab VI

Preman: *Vrijman* Masa Kini?

Pendahuluan

Mungkin kelompok yang paling terkenal di antara empat kelompok yang dibahas di sini adalah preman. Orang tua yang sudah dewasa atau setidaknya sadar akan situasi yang terjadi di sekelilingnya pada periode sebelum tahun 1990 tidak akan mengharapkan bahwa istilah preman akan memiliki makna yang berbeda pada masa sekarang dibandingkan pada masa mereka dahulu. Istilah preman merujuk kepada polisi atau tentara yang tidak memakai seragam atau dengan kata lain, ia berpakaian sipil (berpakaian preman), di mana kebalikannya adalah berpakaian dinas (memakai seragam). Hal ini juga diasumsikan pada arti yang lain; preman berarti sesuatu dalam kepemilikan pribadi, bukan milik negara, seperti mobil preman (mobil pribadi) dan dengan demikian sebaliknya adalah mobil dinas atau mobil pemerintah atau mobil negara. Akibatnya, ketika Van der Kroef pada tahun 1985 berbicara tentang pembunuhan Petrus

(penembakan misterius atau penembak Misterius),⁷ ia tidak menyebutkan satu kata pun tentang ‘preman’. Ia menyebutkan bahwa target dalam operasi Petrus adalah bromocorah atau gali-gali/gali (gabungan anak-anak liar) (Van der Kroef, 1985: 757-758). Tulisan lain setelah tahun 1990 juga menyaebutkan istilah gali untuk para korban Petrus (Pemberton, 1994: 311-318; Siegel, 1999: 225-230, dan Schulte Nordholt, 2002: 48). Jika Petrus terjadi setelah tahun 1990-an, para ahli mungkin akan langsung menyatakan bahwa korbannya adalah para ‘preman’, bukan ‘gali’.

Preman dan Kelompok Strongmen Lainnya

Karena jago dianggap sebagai ‘pahlawan lokal’, ‘pialang kekuasaan’, ‘kriminal’ atau ‘orang-orang yang memiliki ilmu kekebalan dan menguasai seni bela diri’ (Schulte Nordholt, 1991: 89), maka preman hanya dapat mewarisi aspek ‘kriminal’ dari kelompok jago yang sudah tidak ada lagi tersebut. Namun, orang-orang seperti Yapto Soerjosoemarno dan Yorrys Raweyai melalui organisasi Pemuda Pancasila (PP), bagaimanapun juga dapat mewarisi aspek ‘pialang kekuasaan’ dari jago karena fakta

⁷ Mengenai tulisan tentang Petrus, lihat di antaranya Van der Kroef (1985) dan Pemberton (1994).

bahwa mereka bisa menjadi jembatan antara kebutuhan pemerintah Soeharto untuk mengamankan kekuasaannya melalui dukungan Golkar dan harapan dari PP untuk memenuhi misinya dalam meningkatkan taraf kesejahteraan mereka.⁸

Jika jago adalah kakek dari preman (Schulte Nordholt, 2002: 48), maka gali mungkin menjadi ayah dari preman. Gali dikenali karena tato mereka. Bahkan, tato ini membedakan antara orang biasa dan penjahat atau residivis pada waktu terjadi Petrus. Gali adalah penjahat kecil. Mereka bisa jadi adalah penjahat yang masih aktif, mantan narapidana atau residivis. Gali adalah masa lalu. Pada saat Petrus berakhir pada tahun 1985, gali juga berakhir. Ryter telah menyebutkan dua perbedaan antara gali dan preman. Pertama, gali adalah fenomena kolektif: ancaman yang dibuat adalah ancaman geng yang sering berkeliaran di jalan. Preman, sementara itu, dapat berdiri sebagai tokoh tunggal. Kedua, berbeda dengan pemahaman bahwa gali dianggap nakal dan tidak sah, istilah preman

⁸ Yapto adalah anak seorang Jenderal dari etnis Jawa dengan ibu berdarah Belanda dan Yahudi, sedangkan Yorrys memiliki darah Tionghoa dan Papua. Keduanya adalah tokoh PP yang paling berpengaruh. Lihat Ryter, 1998: 45-73.

telah diasosiasikan dengan kepentingan pihak yang berwenang (Ryter, 1998: 49). Namun, saya berpendapat bahwa meskipun nama mereka, ‘gabungan’ (geng), gali juga bisa beroperasi sendirian. Tidak hanya itu, regu pembunuh yang membunuh gali pada masa Petrus hanya membunuh mereka satu per satu, dan dengan demikian tidak membunuh seluruh kelompok. Lebih lanjut, dan yang lebih penting lagi, pemerintah tidak membedakan apakah mereka berasal dari kelompok tertentu atau beroperasi sendiri.⁹ Preman, meskipun dapat beroperasi sendiri, mereka tetap harus bergantung kepada pihak lain. Jika mereka tidak memiliki perlindungan, mereka hanyalah ‘serigala kesepian yang dapat dengan mudah dijinakkan’ (Blok, 1972: 498). Anggota PP, misalnya, perlu menawarkan pelayananan kepada pihak berwenang dengan tujuan bukan hanya untuk mendapatkan

⁹ Pada tanggal 3 April 1983, Letnan Kolonel M. Hasbi, Komandan Kodim 0734 Yogyakarta mengeluarkan pernyataan yang dikutip oleh *Kedaulatan Rakyat* yang berbunyi: “Seluruh kriminal, baik mereka yang beroperasi sendirian atau bergabung di dalam sebuah kelompok, harus menyerahkan diri mereka ke aparat” (Pemberton, 1994: 311). Kini jelas terlihat bahwa pihak yang berwenang tidak membedakan apakah gali beroperasi sendiri atau tergabung di dalam sebuah kelompok tertentu.

sesuatu sebagai imbalan, seperti mampu mengendalikan pendapatan yang dihasilkan dalam perekonomian informal, terutama parkir dan pengelolaan pedagang kaki lima (Ryter, 1998: 69), tetapi mereka juga membutuhkan perlindungan dari negara untuk bertahan hidup.

Preman dan Orde Baru

Gali, seperti yang kita tahu dari kasus Petrus, bisa mewariskan karakteristik yang tangguh kepada preman. pewarisan ini telah dimungkinkan karena fakta bahwa preman dan negara saling membutuhkan. Di bawah rezim Suharto, misalnya, perdekkingan atau perbekkingan sangat umum terjadi. Negara, biasanya melalui polisi dan angkatan bersenjata memanfaatkan kelompok preman untuk mengamankan bisnis pribadi mereka. Bisnis ini meliputi BUMN (Badan Usaha Milik Negara), koperasi dan yayasan, bisnis swasta yang dilakukan oleh eks pejabat tinggi dari unsur polisi dan angkatan bersenjata, sampai lembaga swasta yang berafiliasi dengan polisi dan angkatan bersenjata. Sebagai gantinya, kelompok preman tidak hanya bisa bertahan hidup, namun lebih signifikan lagi, mereka secara finansial didukung oleh pejabat negara tersebut (Gunawan dan Patria, 2000: 50-

52).¹⁰ Premanisme negara, seperti yang dikatakan oleh Tim Lindsey adalah sifat Orde Baru. Selain itu, ia berpendapat bahwa di bawah Soeharto, kekuasaan setara dengan kekayaan. Kekuasaan diperoleh melalui kekerasan, dan berpusat pada elit yang setara dengan negara itu sendiri. Untuk mengamankan kesetaraan ini Orde Baru menciptakan negara 'rahasia' paralel untuk memastikan akses elit ke dalam sumber dana ilegal atau dana ekstra-legal, dan dengan demikian melalui sistem inilah bisnis dan pemerintahan benar-benar dilakukan. Selain itu, struktur 'geng' kriminal saingan menghubungkan politik dan elit bisnis melalui militer kepada preman, yang kadang-kadang bermutasi menjadi tentara swasta atau milisi yang terkait dengan para pemimpin politik dan bisnis.¹¹ Sistem ini meresap ke dalam setiap aspek kehidupan

¹⁰ Seluruh empat elemen (sekarang hanya tiga, minus polisi) di angkatan bersenjata pada masa Suharto memiliki sejumlah perusahaan di bawah Yayasan Kartika Paksi (Angkatan Darat), Yayasan Adi Upaya (Angkatan Udara), Yayasan Bhumyamca (Angkatan Laut) dan Yayasan Brata Bhakti (polisi). Lihat Gunawan dan Patria, 2000: 51.

¹¹ Menurut Bouchier, polisi menemukan bukti bahwa dalam banyak kejadian senjata yang digunakan oleh kriminal dalam perampokan berasal dari aparat militer. Hal ini menandakan bahwa ada kolaborasi langsung antara aparat dan kriminal. Lihat Bouchier, 1994: 182-183.

publik di bawah Orde Baru, dari mulai perjanjian-perjanjian, penegakan hukum, narkoba, hingga transportasi umum. Dengan kata sederhana, itu adalah sistem di mana preman mampu mengumpulkan japrem, yang pada gilirannya membayar setoran untuk pejabat negara, sebagai imbalan atas hak untuk beroperasi (Lindsey, 2001: 285-290). Namun, saya percaya bahwa pandangan Lindsey yang menunjukkan bahwa sikap negara terhadap kekerasan dan penggunaan kekerasan kriminal dapat dilacak ke masa revolusi, menurut saya agak menyesatkan. Saya telah membahas tentang akar kekerasan ini di bab kedua.

Preman di Jakarta terorganisasi ke dalam geng permanen berdasarkan etnis yang mengontrol wilayah yang jelas batas-batasnya (Schulte Nordholt, 2002: 48-49). Hal ini juga berlaku untuk kota-kota besar lainnya di Indonesia. Di Surabaya, orang Jawa dan orang Madura selalu bersaing memperebutkan wilayah Tanjung Perak. Di Bandung, preman dari daerah Priangan, sebagian besar dari Garut, atau preman dari Banten terus-menerus bentrok di daerah Cicaheum atau Alun-alun.

Penutup

Seperti jago, weri, mata-mata ladang opium (spy), dan blater yang semuanya berada di Jawa Tengah dan Timur (Schulte Nordholt, 2002: 39; Onghokham (a), 1978: 133; Rush, 1990: 108, dan Onghokham (b), 1978: 74-75), bisnis utama preman adalah pemerasan. Bisnis pemerasan tersebut berkisar mulai dari meminta uang di jalan dengan berlaku sebagai polisi lalu lintas swasta (pak ogah/polisi cepek) di mana targetnya adalah orang-orang yang mengendarai mobil dan juga sopir angkutan umum; mengendalikan tempat parkir; melindungi pencopet di pasar, terminal, stasiun dan tempat umum lainnya; sampai yang bertanggung jawab atas industri perjudian, panti pijat, diskotik dan tempat hiburan lain. Dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit, preman selalu membutuhkan pihak lain untuk bertahan hidup. Semua operasi harus dilaksanakan dengan lancar; jika tidak polisi akan campur tangan. Namun, jika polisi tahu tentang operasi preman, selalu ada cara untuk memecahkan masalah. Bos preman selalu dapat bernegosiasi dengan aparat dengan cara penyuaan. Japrem yang menjadi sumber penghasilan preman pada akhirnya akan berubah menjadi pendapatan aparat. Meskipun metode

operasi preman bervariasi dari satu kota ke kota lainnya, namun, pola ini sangat umum di Indonesia dan tampaknya menjadi semakin kuat setelah Orde Baru runtuh.

Bab VII

Sepak Terjang *Strongmen* dalam Bingkai Budaya dan Politik Lokal

Pendahuluan

Dalam banyak hal, *strongmen* di Jawa memiliki kesamaan dengan mafiosi di Sisilia. Dalam studinya (1988), yang mendiskusikan mafiosi pedesaan di Sisilia barat pada abad ke-19 dan 20 melalui kajian mengenai jaringan social mereka yang luas, Blok mengungkapkan kondisi-kondisi di mana mafiosi menjadi kekuatan besar di pedalaman Sisilia barat dan menghubungkan mereka dengan tahapan khas dari perkembangan yang dicapai oleh masyarakat Italia secara luas, atau setidaknya wilayah pinggiran Italia bagian selatan secara khusus (1988: xxvii-xxviii).

Selain itu, menurut Gambetta (1993), mafia adalah '*a specific economic enterprise, an industry which produces, promotes, and sells private protection*' (1993: 1). Gambetta menegaskan link penting antara mafia dengan negara. Ia berpendapat bahwa '*the parallel between the mafia and the state has clear limits, and consequently, that the view of the mafia as a legal system*

in its own right does not actually stand up' (1993: 7). Studinya berkontribusi penting kepada penelitian tentang *strongmen* ini dengan menegaskan bahwa '*mafiosi are not entrepreneurs primarily involved in dealing with illegal goods, nor are they entrepreneurs in the sense of handling violently the production of legal goods'* (1993: 9). Proposisi ini tidak diragukan lagi juga ditemukan di dalam karakteristik kelompok-kelompok *strongmen* di dalam penelitian ini; bahwa mereka bukanlah sekedar pelaku-pelaku kriminal dalam konteks budaya dan politik lokal di Jawa.

Fenomena Strongmen di Indonesia

Di dalam studi ini, kita telah menyaksikan bahwa pada prinsipnya *strongmen* di Jawa bukanlah kriminal, walaupun beberapa di antaranya mungkin terlibat dalam aktivitas kriminal. Mereka adalah *strongmen* lokal yang menjadi bagian dari fenomena *strongmen* di Indonesia secara umum. *Strongmen* tersebut berperan sebagai pialang kekuasaan dan juga pialang budaya dan juga sebagai *fixer* (orang yang menyelesaikan permasalahan antara masyarakat dengan aparat). Kita juga telah menyaksikan bagaimana kelompok kekerasan di Jawa menjalankan aktivitas kriminal untuk memperoleh keuntungan material dan bagaimana mereka

beroperasi sendiri atau bergabung ke dalam kelompok tertentu untuk memperoleh reputasinya melalui ketakutan yang mereka sebarkan di antara masyarakat lokal, seperti yang terjadi pada *strongmen*.

Dalam bingkai budaya dan politik lokal, kita dapat melihat bahwa *strongmen* adalah orang-orang yang ditakuti, disegani, dan memiliki kedudukan tinggi di masyarakat. Sementara itu, walaupun kelompok kekerasan juga ditakuti, namun mereka jelas-jelas tidak disegani dan juga tidak memiliki kedudukan tinggi di masyarakat. Namun, pengecualian tetap terjadi. Pada masa Orde Baru, beberapa orang yang pada mulanya dianggap sebagai preman biasa, ternyata mampu bertransformasi menjadi individu yang disegani dan memiliki kedudukan tinggi di masyarakat karena berhasil mengubah citranya dari preman biasa menjadi individu yang mungkin tetap menggunakan cara-cara ilegal untuk memperoleh reputasi dan berbagai macam keuntungan ekonomi, sosial, budaya dan politik, namun tidak terlihat secara jelas oleh masyarakat. Individu-individu seperti itu adalah mereka yang dekat dengan kekuasaan yang dipegang oleh Suharto atau agen-agen Orde Baru lainnya, atau juga aparat keamanan di pusat dan daerah.

Ketika pada masa kolonial rampok-bandit, jago dan jawara hanya dapat hidup dan memperoleh penghidupan di pedesaan atau daerah-daerah pinggiran, pada era Suharto dan pasca-Suharto jawara dapat melangkah lebih jauh lagi dengan tampil sebagai kekuatan ekonomi, sosial, budaya dan politik di Banten. Di saat yang hampir bersamaan, kelompok kekerasan baru, yaitu preman, hadir di akhir masa Orde Baru dan telah merambah seluruh wilayah Indonesia dan menjadi kelompok yang menimbulkan ketakutan di masyarakat dan menjadi permasalahan baru bagi negara karena mereka sudah mengakar dengan kuat dan menjadi kelompok kriminal yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang sulit untuk diberantas. Sementara itu, rampok-bandit dan jago yang pernah berjaya di Jawa kini telah tiada. Kesempatan yang diperoleh oleh jawara dan preman untuk mengembangkan sayap mereka tidak dapat mereka raih karena rampok-bandit yang merupakan fenomena pedesaan dapat ditumpas ketika penegakan hukum yang lebih kuat diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda dan juga karena ada perbaikan perekonomian di akhir abad ke-19 yang mengubah para rampok-bandit menjadi petani atau pengusaha.

Untuk kasus jago, tampaknya tidak ruang bagi *strongmen* di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk melanjutkan eksistensinya. Kedudukan mereka sebagai pialang kekuasaan dan pialang budaya digantikan oleh kiai, dan juga sebagian kecil oleh kepala desa. Tokoh yang pertama begitu dominan di pedesaan Jawa Tengah dan Jawa Timur sejak akhir abad ke-19 melalui pesantren-pesantren mereka sehingga dunia bawah jago berhasil diimbangi bahkan dikalahkan oleh dunia religius kiai. Tokoh yang kedua juga berhasil memantapkan kedudukannya sejak awal abad ke-20 dengan menjadi pemimpin formal yang bermartabat di pedesaan sehingga masyarakat tidak lagi membutuhkan peranan jago sebagai perantara hubungan dengan negara.

Dalam hal kekayaan, hanya sebagian kecil kelompok rampok-bandit yang mampu menjadi orang kaya. Sebagian besar, terutama anggota kelompok rampok-bandit tetaplah orang miskin pedesaan yang ter subordinasi oleh masyarakatnya sendiri. Bagi jago, sebagian besar memang dapat mengubah dirinya menjadi orang-orang yang berkecukupan secara materi karena peran penting yang mereka mainkan sebagai perantara antara

masyarakat dan negara. Namun, keduanya tidak dapat bertahan hingga kini, dan itu menjelaskan bahwa kedudukan mereka di masa lalu walaupun bagi jago dibutuhkan oleh masyarakat dan juga negara, tetaplah kedudukan mereka tidak stabil dan mudah rapuh karena adanya perubahan kebijakan pemerintah kolonial yang mereformasi sistem ekonomi, sosial, budaya dan politik. Sementara itu, banyak jawara yang justru hingga kini mampu dan bertahan dalam usahanya untuk memperkaya diri mereka melalui saluran-saluran ekonomi dan politiknya. Ketika menjadi pengusaha atau politisi, mereka tentu saja dapat membuat diri mereka memiliki kekayaan yang mungkin tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi pada preman. Preman kecil yang beroperasi sendirian di jalan tentu saja tidak akan pernah menjadi orang kaya raya karena “pekerjaan” seperti itu tidak mungkin akan dapat bertahan lama. Namun, preman besar yang memimpin kelompok-kelompok kekerasan tertentu dan yang mampu menjalin hubungan ilegal dengan aparat keamanan dan pejabat pemerintah tentu saja lambat laun mampu berubah menjadi individu-individu yang sejahtera dalam masalah finansial.

Alasan mengapa jawara dan preman hingga kini masih dapat tetap menunjukkan keberadaannya adalah karena Indonesia telah mengalami ketiadaan pengawasan yang kuat akan keberadaan kelompok-kelompok ini. Akibatnya, ketidakmampuan institusi-institusi negara dalam menegakkan hukum telah member ruang bagi jawara dan preman untuk meluaskan pengaruhnya dan bahkan menantang pejabat dan tokoh-tokoh keagamaan. Yang jelas, satu strategi lain mengapa keduanya dapat bertahan hingga kini adalah bahwa mereka terkenal sangat adaptif dan responsif terhadap transformasi sosial-politik. Bahkan, sangat jelas keduanya mungkin akan membentuk hubungan yang saling menguntungkan dengan negara dan tokoh-tokoh keagamaan ketika kekuasaan negara dan pengaruh pemimpin keagamaan terlalu kuat untuk ditentang atau ketika menjalin aliansi seperti itu dipandang sebagai pilihan yang sangat berguna. Di sini kita melihat bahwa pragmatisme terlihat jelas dalam karakter kedua kelompok tersebut.

Penutup

Yang jelas walaupun sering ditakuti dan dibenci, empat kelompok yang dibahas pernah dan bahkan beberapa di antaranya hingga sekarang tetap

dibutuhkan oleh masyarakat, perangkat desa, pemimpin keagamaan, dan juga pemerintah lokal untuk alasan-alasan tertentu. Salah satu alasan mengapa rampok-bandit, jago dan jawara dapat bertahan lama sebelum kemerdekaan Indonesia adalah ketiadaan kepastian¹² dan penegakkan hukum oleh pihak yang berwenang. Dalam periode kontemporer, alasan ketiadaan kepastian dan juga lemahnya penegakkan hukum tetap menjadi alasan mengapa jawara dan preman dapat bertahan hingga kini, selain alasan-alasan yang telah dijelaskan di atas. Kini telah jelas bahwa *strongmen* dan kelompok-kelompok kekerasan bukanlah penjahat biasa yang akan mudah ditaklukkan.

¹² Komunikasi personal dengan Amrih Widodo, ANU Canberra, Australia.

Bab VIII

Penutup

Kekerasan adalah kategori budaya, bentuk konstruksi yang berkembang secara historis. Pandangan tentang kekerasan selalu dibatasi oleh ruang dan waktu dan sebagian besar tergantung pada mereka yang terlibat di dalamnya, apakah mereka adalah pelaku dan korban, penonton dan pengamat atau saksi dan pihak berwenang. Adu banteng di Spanyol yang bagi kebanyakan orang di mana saja di dunia adalah sebuah pertarungan, tidak dianggap sebagai pertarungan di Spanyol, melainkan sebagai pertunjukan yang disebut *corrida de toros* (menggerakkan banten) (Blok, 2001: 106). Kejahatan sehari-hari berubah dan klasifikasi serta definisi yang mewujudkan kejahatan tidak juga statis dan dengan demikian kita harus mempertimbangkan kekerasan sebagai bentuk konstruksi budaya. Perampokan jalanan dianggap untuk waktu yang lama sebagai pencurian, tetapi baru-baru ini didefinisikan ulang sebagai delik kekerasan. Dahulu, kekerasan terhadap individu, termasuk pembunuhan, dianggap kurang berbahaya dan misalnya dihukum lebih ringan dari kejahatan

terhadap properti. Saat ini, hukum menganggap kekerasan terhadap individu sebagai delik lebih serius daripada kejahatan terhadap properti (Blok, 2001: 106-107).

Dalam pengertian inilah aspek kekerasan dari empat kelompok yang telah saya bahas tidak selalu dianggap sebagai kekerasan yang tidak tercemar. Seperti pengayauan, amok atau carok yang dianggap sebagai tindakan untuk mengekspresikan perilaku ritualistik, pembelaan harga diri dan tidak lebih dari pesan yang ingin disampaikan kepada pihak tertentu, daripada melakukan kekerasan yang tidak memiliki tujuan; rampok-bandit ketika merampok, jago ketika menjembatani dunia bawah dan dunia atas, jawara ketika memanfaatkan aspek materialisme pemilih, atau preman saat melakukan pemerasan, tidak dapat dengan mudah dianggap sebagai pihak yang melakukan kekerasan tanpa arti. Perbuatan kekerasan mereka memang telah mencerminkan waktu dan tempat dan yang lebih penting lagi mencerminkan masyarakat dari mana mereka berasal. Seluruh empat kelompok sebenarnya mampu menjaga kekuasaan mereka karena masyarakat dari mana mereka berasal, sadar atau tidak, justru telah membantu mempertahankan

eksistensi mereka. Namun demikian, masyarakat tidak bisa dianggap sebagai satu-satunya alasan yang menjaga kelangsungan hidup empat kelompok tersebut. Pihak yang berwenanglah, mulai dari masa pra-kolonial hingga saat ini yang telah memanfaatkan kekuatan-kekuatan 'informal' tersebut. Pihak yang berwenang jugalah yang dapat dianggap sebagai pembela dan pelindung dari budaya kekerasan di Indonesia.

Apakah mereka menjadi pialang kekuasaan atau kriminal, mereka adalah penjahat, dalam arti bahwa pemerintah tidak ingin menyentuh mereka. Mereka dapat membuat sekutu dengan penjahat, tetapi mereka juga dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah. Semuanya tergantung pada tuntutan. Mereka dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk menjaga perdamaian dan ketertiban, tetapi mereka akan hampir pasti bekerja sama dengan penjahat jika ada target besar dan mangsa yang mudah. Namun demikian, mereka kebanyakan membuat sekutu dengan pemerintah setempat sebagai usaha untuk mendapatkan mata pencaharian. Selama masa kolonial, otoritas lokal yang kehilangan hak-hak mereka menjadi sekutu utama para *strongmen*. Karena ada sejumlah besar

pejabat daerah yang kehilangan hak-hak mereka, tidak mengherankan, kelompok orang-orang ini bisa tumbuh dan memperluas wilayah mereka dan bersekutu dengan pemerintah setempat (seperti yang dijelaskan oleh C. Amand di halaman-halaman sebelumnya). Tentu saja, untuk memudahkan koordinasi di antara mereka, para *strongmen* menciptakan jaringan mereka sendiri (seperti yang dijelaskan oleh Boeka di halaman-halaman sebelumnya). Dengan membangun jaringan-jaringan yang longgar ini, posisi mereka menjadi lebih kuat dan rumit dan dengan demikian menciptakan kondisi yang kompleks bagi otoritas kolonial untuk membasmi mereka. Di sini kita menyaksikan bahwa kelompok-kelompok kekerasan dimungkinkan untuk membangun dan mengembangkan kelompok mereka karena kebijakan lemah dari pemerintahan kolonial untuk mengakomodasi kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat pribumi. Proses ini tidak terjadi sekaligus, tetapi secara bertahap dan menunjukkan kecenderungan yang kuat ketika kebijakan otoritas kolonial gagal untuk memfasilitasi masyarakat pribumi untuk menciptakan ekonomi berbasis yang kuat dan memburuk karena tidak adanya hukum yang tegas yang memungkinkan

praktik-praktik ilegal dan kekerasan terjadi di masyarakat .

Tidak seperti jago yang tidak tersentuh hingga tahun 1930-an, selama manifestasi dari ‘hukum dan ketertiban’ tidak terganggu, jawara tetap dapat meneruskan bisnis mereka sampai sekarang. Bekerja sama dengan dan dilindungi oleh pejabat setempat, jawara telah berhasil dalam melaksanakan rezim ketakutan di Banten, di mana mereka telah membentuk sebuah sistem yang tidak stabil secara internal yang mengubah hubungan kekuasaan yang menantang struktur formal negara. Mereka adalah apa yang kita sebut sebagai negara bayangan (Schulte Nordholt, 2002: 39-40 dan Hidayat, 2007). Preman yang muncul kemudian, juga telah melakukan pola yang sama dengan pola jawara di Banten. Pembentukan negara yang masih terus berlangsung, seperti demokratisasi dan desentralisasi, memungkinkan kemunculan-kemunculan pemimpin lokal politik baru yang otonom. Proses ini tampaknya memungkinkan atau bahkan memantapkan sejumlah kelompok sosial yang sudah mengakar untuk menggunakan kekerasan dan intimidasi sebagai cara mereka mencapai tujuan dan untuk terus menyebarkan

pengaruh sosial-ekonomi dan politik mereka. Sejalan dengan argumen ini, saya berpendapat bahwa apa yang hanya kita sebut *strongmen* di masa lalu untuk merujuk terutama kepada jago dan kelompok serupa lainnya harus juga menyebut mereka sebagai kelompok kekerasan untuk situasi sekarang, dan dengan demikian ketika kita berbicara tentang jawara atau preman, kita harus juga mengidentifikasi mereka sebagai kelompok-kelompok kekerasan, bukan hanya *strongmen*. Seperti mafia di Sisilia, mereka adalah pengusaha kekerasan. Mereka adalah perantara yang memberikan pelayanan kepada negara dan justru bertentangan dengan penduduk. Mereka memiliki jaringan yang luas yang mampu mempertahankan posisi mereka dalam masyarakat dan negara memungkinkan mereka untuk melanjutkan praktik-praktik kekuasaan mereka.

Daftar Pustaka

Anderson, Benedict R. O`G. *Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946*, Ithaca and London: Cornell University Press, 1972.

Anderson, Benedict R. O`G. *Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism*, London: Verso, 1983.

Armuji, Oji. *Konfigurasi Kekuasaan Elit Lokal: Dinamika Ulama, Jawara dan Penguasa di Kota Cilegon (Masa Orde Baru, Masa Transisi, dan Pasca 2000)*, M. A. Thesis, Universitas Gadjah Mada, 2004.

Arsip Nasional Republik Indonesia, *Memori Serah Jabatan 1931-1940 Jawa Barat (I)*, Jakarta: Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No. 11, 1980.

Atsushi, Ota. *Changes of Regime and Social Dynamics in West Java: Society, State and the Outer World of Banten 1750-1830*, Leiden and Boston: Brill, 2006.

Barker, Joshua. `Surveillance and Territoriality in Bandung,` in Rafael, Vicente L. (Ed.), *Figures of Criminality in Indonesia, the Philippines, and Colonial Vietnam*, Ithaca: Southeast Asia Program Publications, Cornell University, 1999, pp. 95-127.

Blok, Anton. 'The Peasant and the Brigand: Social Banditry Reconsidered', in *Comparative Studies in Society and History*, Vol. 14, No. 4 (September 1972), pp. 494-503.

Blok, Anton. *The Mafia of a Sicilian Village 1860-1960: A Study of Violent Peasant Entrepreneurs*, Oxford: Polity Press, 1988.

Blok, Anton. 'Bandits and Boundaries: Robber Bands and Secret Societies on the Dutch Frontier (1730-1778)', in Anton Blok, *Honour and Violence*, Cambridge: Polity Press, 2001, pp. 29-43.

Blok, Anton. 'Social Banditry Reconsidered', in Anton Blok, *Honour and Violence*, Cambridge: Polity Press, 2001, pp. 14-28.

Blok, Anton. 'The Meaning of 'Senseless' Violence', in Anton Blok, *Honour and Violence*, Cambridge: Polity Press, 2001, pp. 103-114.

Boeka (P.C.C. Hansen Jr.), *Pàh Troeno*, Amsterdam: F van Rossen, 1901

Bourchier, David. 'Crime, Law and State Authority in Indonesia', in Arief Budiman (Ed.), *State and Civil Society in Indonesia*, Clayton: Monash University Centre for Southeast Asian Studies, 1994.

Bruinessen, Martin van, 'Shari`a court, tarekat and pesantren: Religious Institutions in the Banten Sultanate', in *Archipel*, Volume 50, *Banten Histoire d`une région*, 1995, pp. 165-199.

Colombijn, Freek. 'A Cultural Practice of Violence in Indonesia: Lessons from History', in Dewi Fortuna Anwar *et al* (Ed.), *Violent Internal Conflicts in Asia Pacific: Histories, Political Economies and Policies*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, pp. 245-268.

Colombijn, Freek. 'What is so Indonesian about Violence?', in Ingrid Wessel and Georgia Wimhöfer (Eds), *Violence in Indonesia*, Hamburg: Abera, 2001, pp. 25-46.

Colombijn, Freek and J. Thomas Lindblad (Eds.), 'Introduction', in Colombijn, Freek and J. Thomas Lindblad (Eds.), *Roots of Violence in Indonesia: Contemporary Violence in Historical Perspective*, Leiden: KITLV Press, 2002, pp. 1-31.

Cribb, Robert. *Gangsters and Revolutionaries: The Jakarta People`s Militia and the Indonesian Revolution 1945-1949*, North Sydney: Asian Studies Association of Australia, 1991.

Cribb, Robert. 'From Total People`s Defence to Massacre: Explaining Indonesian

Military Violence in East Timor', in Colombijn, Freek and J. Thomas Lindblad (Eds.), *Roots of Violence in Indonesia: Contemporary Violence in Historical Perspective*, Leiden: KITLV Press, 2002, pp. 227-241.

Cribb, Robert. 'Legal Pluralism, Decentralisation and the Roots of Violence in Indonesia', in Dewi Fortuna Anwar et al (Ed.), *Violent Internal Conflicts in Asia Pacific: Histories, Political Economies and Policies*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, pp. 41-57.

Dijk, Kees van. 'The Good, the Bad and the Ugly, Explaining the Unexplainable: *Amuk Massa* in Indonesia', in Colombijn, Freek and J. Thomas Lindblad (Eds.), *Roots of Violence in Indonesia: Contemporary Violence in Historical Perspective*, Leiden: KITLV Press, 2002, pp. 277-297.

Eklöf, Stephan. 'The 1965-1966 Killings in Bali: Historical and Cultural Approaches', in Hüsken, Frans and Huub de Jonge (Eds.), *Violence and Vengeance: Discontent and Conflict in New Order Indonesia*, Saarbrücken: Verlag für Entwicklungspolitik Saarbrücken, 2002, pp. 116-142.

Emmerson, Donald K. *Indonesia's Elite: Political Culture and Cultural Politics*, Ithaca: Cornell University Press, 1976.

Ensering, Else, 'Banten in Times of Revolution', in *Archipel*, Volume 50: *Banten Histoire d'une région*, 1995, pp. 131-163.

Gambetta, Diego. *The Sicilian Mafia: The Business of Private Protection*. Cambridge: Harvard University Press, 1993.

Groneman, Isaac. *Een Kètjoegeschiedenis*, Dordrecht: J.P. Revers, 1887.

Gunawan, F.X. Rudy and Nezar Patria, *Premanisme Politik*, Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 2000.

Heryanto, Ariel. *State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging*, London: Routledge, 2006.

Hidayat, Syarif, 'Shadow State?: Business and Politics in the Province of Banten' in Henk Schulte Nordholt and Gerry van Klinken (Eds.), *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia* (Leiden: KITLV Press, 2007).

Hobsbawm, E. J. *Primitive Rebels: Studies in Archaic Forms of Social Movement in the 19th and 20th Centuries*, New York: Norton, 1959.

Hobsbawm, Eric. *Bandits*, New York: Delacorte Press, 1969.

Hobsbawm, E. J. 'Social Banditry', in Henry A. Landsberger (Ed.), *Rural Protest: Peasant Movements and Social Change*, London: Macmillan, 1974, pp. 142-157.

Hudaeri, 'Tasbih dan Golok', unpublished article for the Ministry of Religious Affairs, 2002.

Institute for Economics and Peace, *Global Peace Index: 2010 Methodology, Results and Findings*, Sydney: Institute for Economics and Peace, 2010

Kartodirdjo, Sartono, *The Peasants' Revolt of Banten in 1888, Its Conditions, Course, and Sequel: A Case Study of Social Movements in Indonesia*, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1966.

Kartodirdjo, Sartono. 'Agrarian Radicalism in Java: Its Setting and Development', in Holt, Claire (Ed.), *Culture and Politics in Indonesia*, Ithaca and London: Cornell University Press, 1972, pp. 71-125.

Kartodirdjo, Sartono. *Protest Movements in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and early Twentieth Centuries*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978.

Koliopoulos, John S. *Brigands with a Cause: Brigandage and Irredentism in Modern Greece 1821-1912*, Oxford: Clarendon Press, 1987.

Kroef, Justus M. Van der. "Petrus": Patterns of Prophylactic Murder in Indonesia, in *Asian Survey*, Vol. 25, No. 7, July 1985, pp. 745-759.

Lev, Daniel S. "The Criminal Regime: Criminal Process in Indonesia", in Vicente L. Rafael (Ed), *Figures of Criminality in Indonesia, the Philippines, and Colonial Vietnam*, Ithaca: Cornell Southeast Asia Program, 1999.

Lindsey, Tim. "The Criminal State: Premanisme and the New Indonesia", in Lloyd, Grayson and Shannon Smith, *Indonesia Today: Challenges of History* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2001), pp. 283-297.

Lucas, Anthony Edward. *The Bamboo Spear Pierces the Payung: The Revolution Against the Bureaucratic Elite in North Central Java in 1945*, PhD Thesis, Canberra: Australian National University, 1981.

Macintyre, Andrew, "State-Society Relations in New Order Indonesia: the Case of Business", in Budiman, Arief (Ed.). *State and Civil Society in*

Indonesia, Clayton: Monash University Centre for Southeast Asian Studies, 1994.

Mansur, Khatib. *Profil Haji Tubagus Chasan Sochib beserta Komentar 100 Tokoh Masyarakat Seputar Pendekar Banten*, Jakarta: Pustaka Antara Utama, 2000.

Masaaki, Okamoto. 'Local Politics in Decentralised Indonesia: the Governor General of Banten Province', in *IIAS Newsletter*, No. 34, July 2004, p. 23.

Masaaki, Okamoto and Abdul hamid, 'Jawara in Power, 1999-2007,' in *Indonesia* 86, October 2008.

Michrob, Halwany and Mudjahid Chudari, *Catatan Masalalu Banten*, Serang: Saudara, 1993.

Milton, Giles. *Nathaniel's Nutmeg: How One Man's Resolve Changed the World*, London: Hodder and Stoughton, 1999.

Nas, Peter J. M. and Pratiwo, 'Java and De Groote Postweg, La Grande Route, the Great Mail Road, Jalan Raya Pos', in *BKI*, 2002, No. 4, pp. 707-725.

Notosusanto, Nugroho and Ismail Saleh, *the Coup Attempt of the 'September 30 Movement' in Indonesia*, Jakarta: PT Pembimbing Masa, 1968.

O'Malley, Pat. 'Social Bandits, Modern Capitalism and the Traditional Peasantry: A Critique of Hobsbawm', in *Journal of Peasant Studies*, 6: 4 (1979), pp. 489-501.

Onghokham, 'The Inscrutable and the Paranoid: An Investigation into the Sources of the Brotodiningrat Affair', in Ruth McVey, *Southeast Asian Transitions: Approaches through Social History*, New Haven and London: Yale University Press, 1978 (a), pp. 112-157.

Onghokham, 'The Pulung-Affair: A Tax-Payers Revolt from Patik: Aspects of Nineteenth Century Rural Politics in Java', in Papers of the Dutch-Indonesian Historical Conference, held at Noordwijkerhout, the Netherlands 19-22 May 1976, Leiden and Jakarta: Bureau of Indonesian Studies, 1978 (b), pp. 64-78.

Onghokham, 'The Jjago in Colonial Java, Ambivalent Champion of the People', in Andrew Turton and Shigeharu Tanabe (Eds.), *History and Peasant Consciousness in South East Asia*, Osaka: National Museum of Ethnology, 1984, pp. 327-343.

Pemberton, John. *On the Subject of "Java"*, Ithaca and London: Cornell University Press, 1994.

Poensen, C. *Brieven over den Islam uit de Binnenlanden van Java*, Leiden: E.J. Brill, 1886.

Pribadi, Yanwar. *Jawara in Banten: Their Socio-Political Roles in the New Order Era 1966-1998*, M.A. Thesis, Leiden University, 2008.

Quinn, George. 'The Javanese Science of Burglary', in *RIMA*, 9, 1, January-June 1975: 33-54.

Reid, Anthony. *The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1979.

Robinson, Geoffrey. 'State, Society and Political Conflict in Bali 1945-1946', in *Indonesia*, Vol. 45 (1988), pp. 1-48.

Rush, James R. *Opium to Java: Revenue Farming and Chinese Enterprise in Colonial Indonesia, 1860-1910*, Ithaca and London: Cornell University Press, 1990.

Ryter, Loren. 'Pemuda Pancasila: the Last Loyalist Free Men of Suharto's Order?', in *Indonesia* 66, October 1998, pp. 45-73.

Salmon, Claudine. 'The Han Family of East Java. Entrepreneurship and Politics (18th-19th Centuries)', in *Archipel*, Volume 41, 1991. pp. 53-87.

Schulte Nordholt, Henk. 'The *Jago* in the Shadow: Crime and 'Order' in the Colonial State in Java', in *RIMA*, Vol. 25/1, Winter 1991, pp. 74-91.

Schulte Nordholt, Henk. 'A Genealogy of Violence', in Colombijn, Freek and J. Thomas Lindblad (Eds.), *Roots of Violence in Indonesia: Contemporary Violence in Historical Perspective*, Leiden: KITLV Press, 2002, pp. 33-61.

Schulte Nordholt, Henk. 'Renegotiating Boundaries: Access, Agency and Identity in Post-Soeharto Indonesia', in *BKI*, Vol. 159, No. 4, 2003, pp. 550-589.

Schulte Nordholt, Henk and Margreet van Till, 'Colonial Criminals in Java, 1870-1910, in Vicente L. Rafael (Ed), *Figures of Criminality in Indonesia, the Philippines, and Colonial Vietnam*, Ithaca: Cornell Southeast Asia Program, 1999.

Schulte Nordholt, Henk and Gerry van Klinken. "Introduction". In *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia*, edited by Henk Schulte Nordholt and Gerry van Klinken. Leiden: KITLV Press, 2007.

Siegel, James T. 'A New Criminal Type in Jakarta: the Nationalization of "Death", in Rafael, Vicente L. (Ed.), *Figures of Criminality in Indonesia, the*

Philippines, and Colonial Vietnam, Ithaca: Southeast Asia Program Publications, Cornell University, 1999, pp. 210-230.

Sierevelt, S. M. `Leger en Politie`, in *Indisch Militair Tijdschrift*, Eerste Halfjaar, 1932, pp 385-394.

Smail, John R. W. *Bandung in the Early Revolution, 1945-1946: A Study in the Social History of the Indonesian Revolution*, Ithaca: Modern Indonesia Project, Cornell University, 1964.

Smith, Anthony D. *National Identity*, Harmondsworth: Penguin, 1991.

Smith, Anthony D. "Nations and History," in M. Guibernau and J. Hutchinson (Eds.), *Understanding Nationalism*, Cambridge: Polity Press, 2001, pp. 9-31.

Suhaedi, H.S. *Jawara Banten: Kajian Sosial-Historis tentang Mobilitas Sosial Jawara*, MA Thesis, Universitas Indonesia, 2006.

Suhartono, *Bandit-bandit Pedesaan: Studi Historis 1850-1942 di Jawa*, Yogyakarta: Aditya Media, 1995.

Sunatra. *Integrasi dan Konflik: Kedudukan Politik Ulama-Jawara dalam Budaya Politik Lokal: Studi Kasus Kepemimpinan Informal Pedesaan di Banten*

Selatan, Ph. D. Thesis, Universitas Padjadjaran, 1997.

Tihami, M. A., *Kiai dan Jawara di Banten: Studi tentang Agama, Magi, dan Kepemimpinan di Desa Pasanggrahan Serang, Banten*. MA Thesis, Universitas Indonesia, 1992.

Till, Margreet van. 'In Search of Si Pitung: The History of an Indonesian Legend', in *BKI* 152, No. 3, 1996, pp. 461-482.

Wessel, Ingrid. 'Introduction', in Ingrid Wessel and Georgia Wimhöfer (Eds), *Violence in Indonesia*, Hamburg: Abera, 2001, pp. 8-14.

Williams, Michael C. *Communism, Religion and Revolt in Banten*, Athens: Ohio University Center for International Studies, 1990.

Wilson, Ian Douglas. *The Politics of Inner Power: The Practice of Pencak Silat in West Java*, Ph.D Thesis, Murdoch University, 2003.

Wulfften Palthe, P. M. van (a). *Over het Bendewezen op Java*, Amsterdam: Van Rossen, 1949.

Wulfften Palthe, P. M. van (b), *Psychological Aspects of the Indonesian Problem*, Leiden: E.J. Brill, 1949.

